



LAKIP 2017



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan

Jalan Andi Pangerang Petta Rani Makassar

Telepon: (0411) 873565, 873513 Fax: (0411) 873513

Laman: lpmpsulsel.kemdikbud.go.id Surel: lpmp.sulsel@kemdikbud.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Sulawesi Selatan, telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Sulawesi Selatan, atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Laporan ini menyajikan informasi capaian kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017 dalam melakukan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Layanan penjaminan mutu pendidikan dalam pelaksanaannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah, supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta kegiatan administrasi lainnya yang sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Sulawesi Selatan.

Kami menyadari bahwa tantangan dan permasalahan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup banyak dan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak dalam penyelesaiannya .

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPMP Sulawesi Selatan selama tahun 2017 dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan program serta perumusan



kebijakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, Januari 2018

Kepala LPMP Sulawesi Selatan,



Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd

NIP 19640715 199403 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
D. Struktur Organisasi	5
E. Fungsi Strategis LPMP	9
F. Permasalahan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	101
BAB IV PENUTUP	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



RINGKASAN EKSEKUTIF

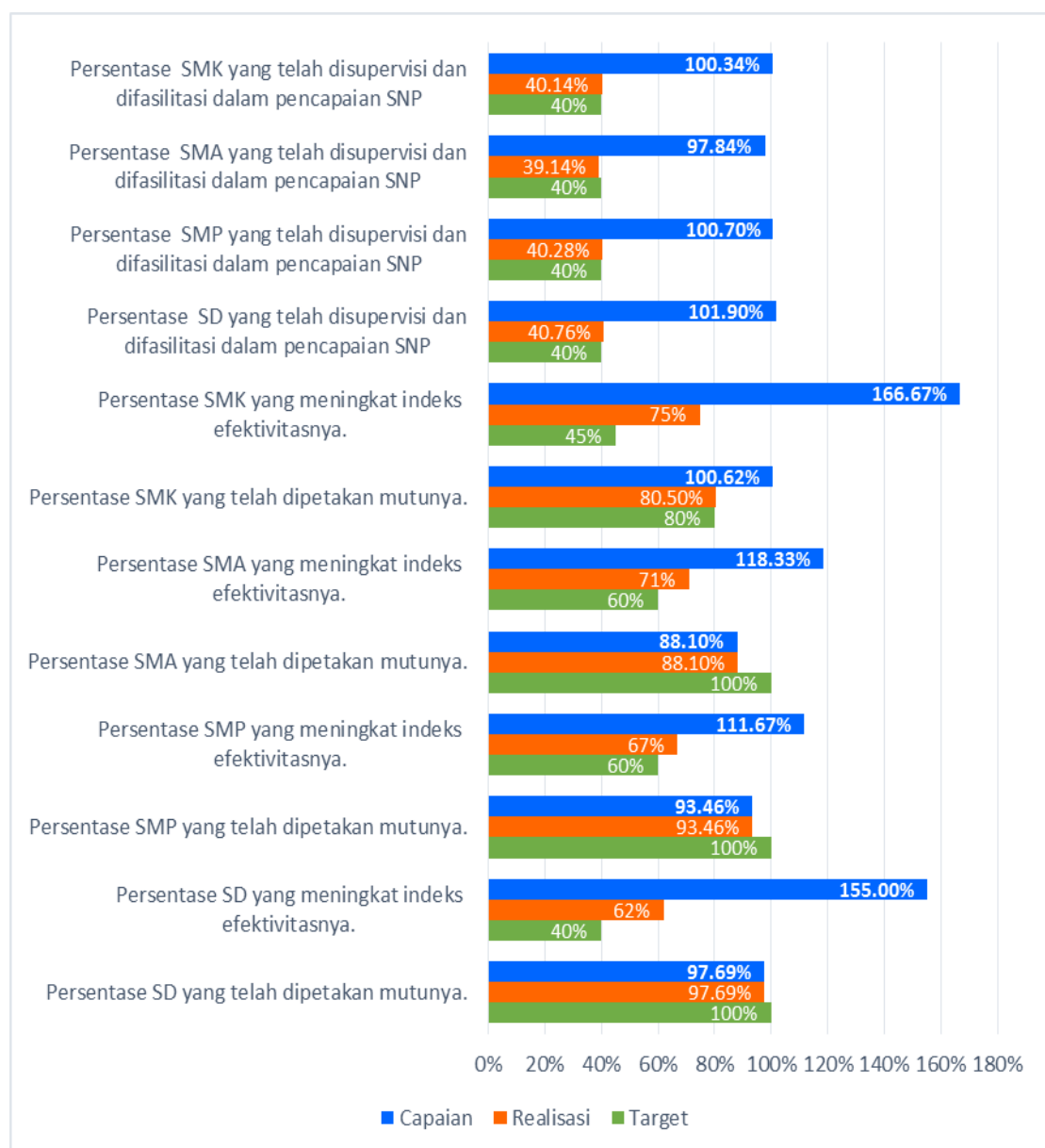
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Sulawesi Selatan sebagai Unit Eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja LPMP Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015 – 2019. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Propinsi Sulawesi Selatan dengan Dirjen Dikdasmen.

LPMP Sulawesi Selatan melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP Propinsi Sumatera Barat, LPMP Propinsi Jawa Tengah, dan LPMP Propinsi Sulawesi Selatan. Kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan, dan kegiatan rutin yang meliputi berbagai kegiatan administrasi yang sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Propinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai data hasil pengukuran kinerja tahun 2017, dari 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebanyak delapan IKK telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan yaitu : (1) Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya; (2) Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya; (3) Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya; (4) Persentase SMK yang dipetakan Mutu Pendidikannya; (5) Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya; (6) Persentase SD yang telah disupervisi

dan difasilitasi dalam pencapaian SNP; dan (7) Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP; (8) Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP. Sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target sebanyak empat IKK, yaitu: (1) Persentase SD yang dipetakan Mutu Pendidikannya; (2) Persentase SMP yang dipetakan Mutu Pendidikannya; (3) Persentase SMA yang dipetakan Mutu Pendidikannya; dan (4) Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.





Alokasi anggaran untuk LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 98.044.617.000 dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 mengalami *self blocking* sebesar Rp. 7,723,218,000, sehingga pagu LPMP Sulawesi Selatan setelah *self blocking* menjadi Rp. 90.321.399.000. Dari pagu anggaran Rp. 90.321.399.000 telah berhasil terserap sebesar Rp. 85.224.854.255 sehingga daya serap LPMP Sulawesi Selatan untuk tahun 2017 sebesar 94.36% setelah *self blocking* atau 86.92% dari pagu awal.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja dijumpai beberapa permasalahan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti kualitas sumber daya pendidikan belum memenuhi standar, mutu satuan pendidikan belum merata, ketidaksinkronan kebijakan pendidikan pusat dan daerah, serta kebijakan pemotongan anggaran pada tahun berjalan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, maka berbagai permasalahan yang muncul dan berpengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja instansi perlu diantisipasi sejak awal dengan menyusun langkah-langkah taktis dan strategis untuk mencegah dan mengurangi potensi hambatan pencapaian kinerja.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model, dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan (Permendikbud No.15 Tahun 2015).

LPMP Sulawesi Selatan pertama kali terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Balai Penataran Guru (BPG). BPG Ujung Pandang, yang merupakan cikal bakal LPMP Sulawesi Selatan, diresmikan pada tanggal 27 April 1977 oleh Dirjen Kebudayaan Prof. Ida Bagus Mantra mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disusul dengan pelantikan personil pimpinan dan staf pada tanggal 27 Januari 1979 oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dardji Darmodihardjo, SH berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 78360/C/3/1978.

Pada awal berdirinya tugas dan fungsi utama BPG adalah sebagai unit pelaksana teknis dalam peningkatan pendidikan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan.

Seiring perubahan paradigma pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan maka pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/O/2003 tertanggal 4 Juli 2003 tentang pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Sejak diterbitkannya Kepmendiknas tersebut maka BPG Ujung Pandang secara resmi berubah menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan



berdasarkan Permendiknas RI No. 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu melakukan refungsionalisasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Sejak berubah nama dan fungsi dari BPG Ujung Pandang menjadi LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2003, telah terjadi lima kali pergantian kepala. Saat ini, Kepala LPMP Sulawesi Selatan dijabat oleh Dr. H. Abd. Halim Muharram, M.Pd. yang dilantik pada tanggal 26 Januari 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhajir Efendi berdasarkan SK Nomor:111/MPK/RHS/KP/2016.

LPMP Sulawesi Selatan memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 134 orang PNS dan 40 orang tenaga honorer. Dari 134 PNS terdapat tenaga fungsional tertentu sejumlah 25 orang, pejabat struktural 11 orang, dan fungsional umum 98 orang, dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) sebanyak 9 orang, Magister (S2) sebanyak 54 orang, Sarjana (S1) sebanyak 52 orang, Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 14 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan SD atau sederajat sebanyak 2 orang.

LPMP Sulawesi Selatan mempunyai ruang kelas sebanyak 12 Kelas dengan jumlah kapasitas keseluruhan 561 orang. LPMP Sulawesi Selatan juga telah merenovasi ruang pertemuan (Aula) dengan tampilan yang lebih menarik dari tahun sebelumnya dengan daya tampung yang bervariasi. Aula 1 dengan kapasitas 200 orang, Aula 2 berkapasitas 80 orang dan Aula 3 berkapasitas 45 orang. Adapun untuk mendukung kelancaran dalam hal akomodasi, LPMP Sulawesi Selatan juga menyediakan fasilitas asrama atau wisma sebanyak 3 buah.

Wisma Anggrek berkapasitas 96 Orang, Wisma Cempaka berkapasitas 96 Orang dan Wisma Dahlia berkapasitas 34 Orang. Fasilitas lainnya yang dimiliki LPMP Sulawesi Selatan adalah Lab. Komputer, Ruang Fitness, Lapangan Tennis, Lapangan Bulutangkis, Masjid dan tempat parkir yang luas yang dapat menampung lebih dari 100 kendaraan.

Sejak tahun 2003 LPMP Sulawesi Selatan telah memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang aktivitas sehari-hari pegawai maupun pengguna. Layanan berbasis *online* juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja pegawai maupun memberikan layanan bagi pelanggan eksternal LPMP Sulawesi Selatan. Informasi mengenai LPMP Sulawesi Selatan bisa diakses melalui website *lpmpsulsel.kemdikbud.go.id*. Produk publikasi lainnya yaitu penerbitan jurnal.

Selain itu, LPMP Sulawesi Selatan juga telah membuat aplikasi Sistem Informasi Kegiatan (*Simkeg*) yang memuat program kegiatan tahunan dan terhubung dengan penerbitan surat tugas. Aplikasi lainnya berupa perpustakaan *online* yang digunakan untuk melihat katalog buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, LPMP Sulawesi Selatan memanfaatkan aplikasi yang merupakan program dari Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maupun Biro Keuangan/Kepegawaian/Umum dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif.

LPMP Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan kerjasama di bidang pelayanan pendidikan dan pemanfaatan sarana prasarana. Sosialisasi program lembaga dilakukan secara menyeluruh pada 24 Kabupaten/Kota untuk menyampaikan program kerja, kapasitas SDM, tawaran kerjasama dan sarana prasarana yang tersedia di LPMP Sulawesi Selatan. Berkenaan dengan itu, LPMP Sulawesi Selatan mulai dikenal oleh masyarakat luas, di mana hal itu terlihat dengan adanya peningkatan persentase program kemitraan. Pola kemitraan LPMP Sulawesi Selatan dengan stakeholder juga semakin meluas.

Persentase permintaan penggunaan Sarana dan Prasarana juga meningkat sepanjang tahun 2017. Pengguna layanan tidak hanya berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tetapi juga dari instansi lain, baik pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2017, persentase program kemitraan LPMP Sulawesi Selatan dengan pihak pengguna meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan bermitranya LPMP Sulawesi Selatan dengan instansi



lain dalam bidang pendidikan diharapkan muncul sinergi positif dalam upaya peningkatan penjaminan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya oleh LPMP Sulawesi Selatan adalah kebijakan Kemdikbud yang terkadang tidak sejalan dengan instansi yang ada di daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka LPMP Sulawesi Selatan membangun komunikasi efektif dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjalankan program yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Dikdasmen Kemendikbud. Kehadiran Lembaga lain sesama UPT Kemendikbud juga memberikan warna tersendiri dalam bidang pendidikan di Sulawesi Selatan. Dengan kondisi tersebut, maka seyogyanya LPMP Sulawesi Selatan perlu menegaskan kembali eksistensinya sebagai UPT Kemdikbud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam hal melakukan penjaminan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kemendikbud.
4. Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Permendikbud No. 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ;



6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : DIPA-023.03.2.417810/2017, tanggal 7 Desember 2016.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan sesuai dengan Permendikbud No. 15 Tahun 2015 adalah melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

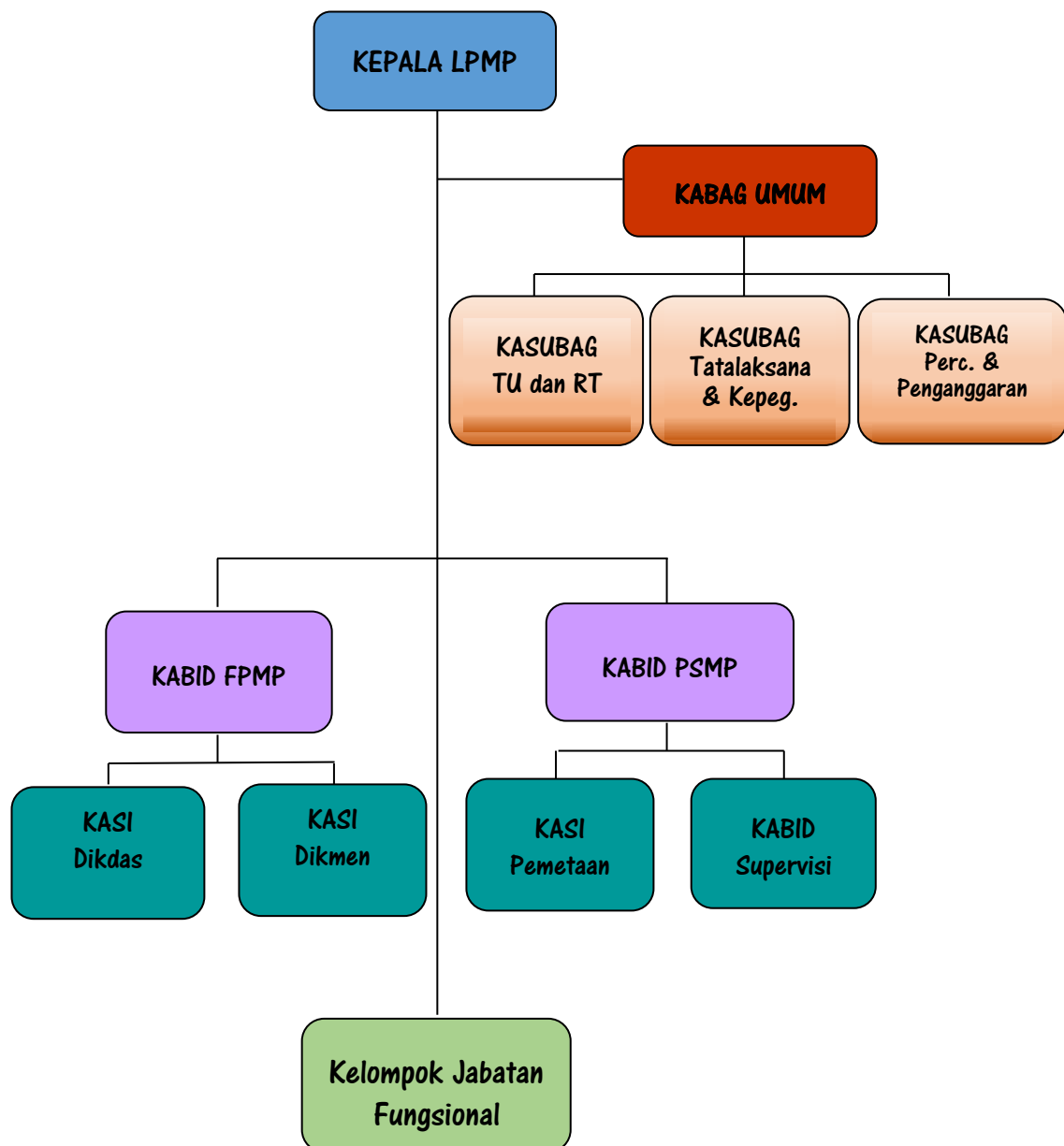
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, maka struktur organisasi LPMP Sulawesi Selatan terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan;
4. Bidang Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP
(Permendikbud No. 15 Tahun 2015)**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP dibantu oleh Bagian Umum, Bidang PSMP, Bidang FPMP, dan Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP. Bagian Umum terdiri atas : subbagian tata usaha dan rumahtangga, subbagian tatalaksana dan kepegawaian, dan subbagian perencanaan dan penganggaran, dengan tugas :
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara;
 - b. Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta laporan LPMP.
2. Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan, pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a. Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan pemetaan dan pengembangan model, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, kemitraan serta evaluasi pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Seksi Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan supervisi, pengembangan model, dan kemitraan pelaksanaan

supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.

3. Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan model peningkatan mutu, dan kemitraan di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Dasar; mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan dasar;
 - b. Seksi Pendidikan Menengah; mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan model peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang kegiatannya. Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dirjen Dikdasmen. LPMP wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dirjen Dikdasmen dan menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta supervisi dan fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi .

E. Fungsi Strategis

Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan (Permendiknas No. 63 Tahun 2009). Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa Indonesia.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah usaha-usaha untuk memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Setiap pemangku kepentingan pusat, provinsi, daerah, dan satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam kegiatan dan usaha-usaha penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2015, LPMP Sulawesi Selatan mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis kemdikbud yang berkedudukan di provinsi, LPMP Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam penjaminan mutu pendidikan. Usaha penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh LPMP Sulawesi Selatan melalui kegiatan pemetaan mutu, fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan, pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan penjaminan mutu pendidikan, dan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah.

F. Permasalahan

Kinerja suatu instansi pemerintah sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai variabel yang turut menentukan dalam hal pencapaian akhir. Variabel tersebut dapat berupa faktor penunjang dan juga faktor penghambat. Faktor penunjang dan faktor penghambat secara sederhana dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan berbagai hal yang menjadi keunggulan LPMP Sulawesi Selatan, baik menyangkut sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, anggaran, kelembagaan, dan berbagai hal lainnya yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penunjang dalam memberikan kontribusi positif terhadap kinerja secara keseluruhan. Namun demikian hal itu tidak serta merta dapat mengeliminir permasalahan yang muncul, yang dapat menjadi faktor penghambat sehingga memberi kontribusi secara negatif terhadap pencapaian kinerja instansi.

Guna untuk mengurangi potensi kegagalan pencapaian kinerja instansi, maka berikut akan dipaparkan beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi LPMP Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Meski secara umum dari segi kualifikasi pendidikan SDM sudah cukup baik, bahkan sangat baik, tetapi hal itu ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja yang optimal. Padahal seharusnya kondisi SDM (baik dari segi kuantitas maupun kualitas) yang berkualitas berbanding lurus dengan pencapaian kinerja instansi.

2. Hubungan dengan Instansi Lain

Salah satu faktor yang memberi kontribusi negatif (penghambat) terhadap pencapaian kinerja pada suatu instansi pemerintah, adalah berkaitan dengan hubungan dengan instansi lain maupun semua stakeholder terkait. Sebagai UPT Pusat yang berada di daerah, LPMP Sulawesi Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi langsung dalam hal penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Hubungan LPMP dengan instansi lain dan stakeholder pendidikan hanya bersifat koordinasi, sehingga membatasi

ruang gerak LPMP dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi terkait pelaksanaan anggaran dapat terealisasi secara optimal di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan.

3. Pemotongan Anggaran

Kebijakan pemotongan anggaran (*self blocking*) pada tahun berjalan sedikit banyak telah memberi kontribusi negatif terhadap pencapaian kinerja. Pagu anggaran yang sebelumnya disetujui telah disesuaikan dengan setiap mata anggaran kegiatan, harus dilakukan penyesuaian kembali akibat kebijakan *self blockin*. Beberapa mata anggaran kegiatan terpaksa mengalami revisi, bahkan harus dihapus menyusul kebijakan *self blocking* tersebut.

4. Kualitas Guru

Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengukur aspek kompetensi pedagogik dan profesional, diketahui bahwa perolehan rata-rata nilai kompetensi guru di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Berdasarkan hasil UKG tahun 2015, rata-rata nilai kompetensi guru hanya 52,55 dari angka maksimal 100. Selain itu, seringkali guru mengajar pada bidang lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kondisi tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran.

5. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2016, belum ada satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) di Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan bahkan masih ada sekolah yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6. Komitmen Penyelenggaran Pendidikan

Rendahnya komitmen penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara terus menerus



dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari para pemangku kepentingan tentang pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.

7. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan oleh penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan.
8. Belum sinkronnya kebijakan dan program pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, LPMP Sulawesi Selatan membuat perjanjian kinerja yang menyajikan target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2017. Target kinerja tersebut merupakan tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja dan pada akhir tahun capaian kinerja tersebut disajikan dalam laporan kinerja tahunan.

LPMP Sulawesi Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 98.044.617.000 untuk membiayai pencapaian target kinerja tahun 2017. Anggaran tersebut dialokasikan untuk merealisasikan satu sasaran strategis dengan dua belas indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
LPMP Sulawesi Selatan T.A. 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Anggaran
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya		9069 sekolah	4,256,256,000
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya.	90%	
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - <i>Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)</i>	20% 6408 sekolah	
	3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya.	90%	
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - <i>Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)</i>	40% 1636 sekolah	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Anggaran
	5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya.	90%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	40% 580 sekolah	
	7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya.	80%	
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	40% 445	
	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		3681 sekolah	7.411.601.000
	1	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	40% 343 sekolah 2249 sekolah	25.899.730.000
	2	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	40% 63 sekolah 598 sekolah	13,830,490,000
	3	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	40% 50 sekolah 201 sekolah	6,997,330,000
	4	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	40% 24 sekolah	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	- Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	153 sekolah	6,247,530,000

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan pemotongan anggaran (*selfblocking*) pada PAGU Anggaran LPMP Sulawesi Selatan dari pagu awal sebesar Rp. 98.044.617.000 menjadi Rp 90.321.399.000. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan revisi perjanjian kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
LPMP Sulawesi Selatan T.A. 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	9069 sekolah	3.749.896.000
	1 Persentase SD yang telah dipetakan mutunya.	100%	
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	40% 6408 sekolah	
	3 Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya.	100%	
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	60% 1636 sekolah	
	5 Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya.	100%	
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	60% 580 sekolah	
	7 Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya.	80%	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Anggaran
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	45% 445	
	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		3681 sekolah	55.112.097.000
	9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	40% 343 sekolah 2249 sekolah	21.593.310.000
	10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	40% 63 sekolah 598 sekolah	15.091.191.000
	11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	40% 50 sekolah 201 sekolah	6.588.255.000
	12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	40% 24 sekolah 153 sekolah	5.772.055.000

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian kinerja adalah Rp. 58.861.993.000, sedangkan jumlah anggaran



keseluruhan dalam DIPA LPMP Sulawesi Selatan setelah *self blocking* sebanyak Rp. 90.321.399.000. Adapun sisa anggaran yang tidak dimasukkan dalam perjanjian kinerja berupa anggaran layanan dukungan manajemen yang terdiri atas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengelolaan ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan; anggaran layanan perkantoran yang terdiri atas pembayaran gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor; dan anggaran layanan internal/belanja modal yang terdiri atas pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, serta pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan capaian kinerja dan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2017.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2017, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan satu sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja untuk dicapai. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Sasaran Strategis “Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”

Ketercapaian sasaran strategis “meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan” didukung melalui ketercapaian dua belas indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
2. Pesentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya.

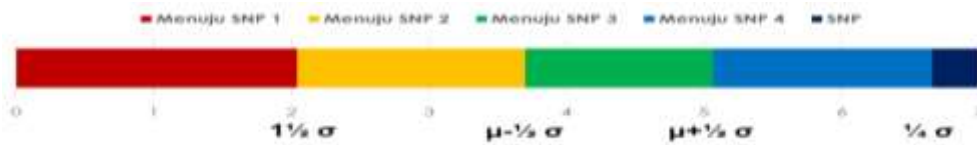
3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya.
5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya.
7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya.
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya.
9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.

Upaya LPMP Sulawesi Selatan meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan.

Langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu adalah pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Dalam implementasinya, sejak tahun 2016, penjaringan data mutu pendidikan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dan Dapodik.

Pelaksanaan pengolahan dan analisis data hasil Pemetaan Mutu Pendidikan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu proses penginputan data, proses

pengolahan data, dan proses analisis data. Untuk memudahkan analisis, dibuat rentang capaian SNP dengan menggunakan fungsi standar deviasi.



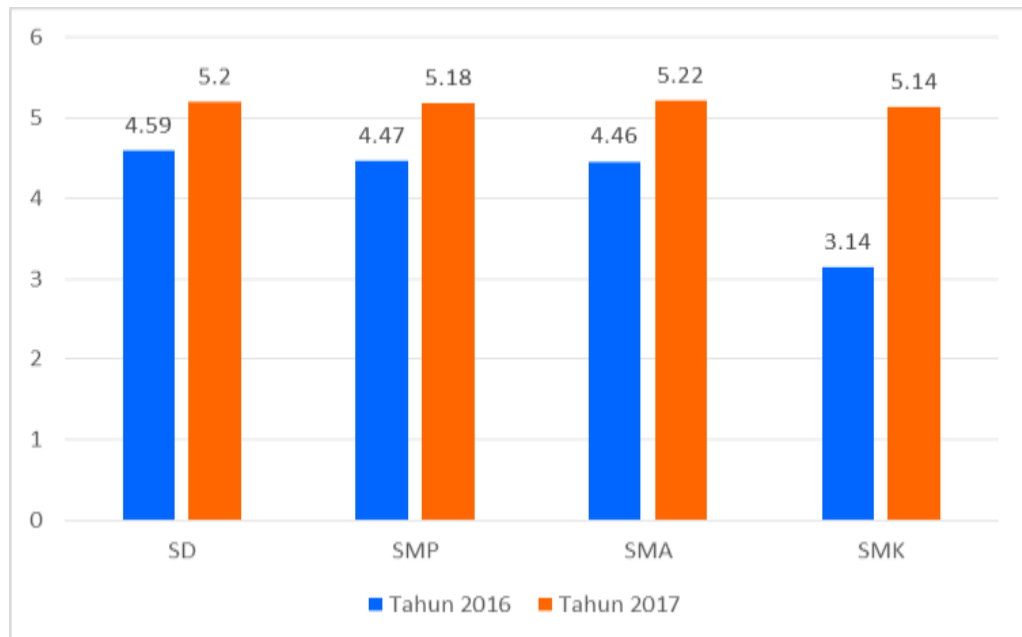
Sehingga rentang nilai capaian SNP yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Kategori	Baras Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0.00	2.04
Menuju SNP 2	2.04	3.70
Menuju SNP 3	3.70	5.06
Menuju SNP 4	5.06	6.66
SNP	6.66	7.00

Hasil pemetaan mutu tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan capaian SNP dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian SNP tahun 2016 berada pada kategori "Menuju SNP 3" dengan skor rata-rata 4.17 meningkat menjadi "Menuju SNP 4" dengan skor rata-rata 5.19 pada tahun 2017. Peningkatan capaian SNP tersebut menunjukkan pula adanya peningkatan indeks efektivitas atau capaian SNP dari satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Perbandingan capaian SNP tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian SNP Tahun 2016 dan 2017

Jenjang	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Skor rata-rata	Capaian	Skor rata-rata	Capaian
SD	4.59	Menuju SNP 3	5.2	Menuju SNP 4
SMP	4.47	Menuju SNP 3	5.18	Menuju SNP 4
SMA	4.46	Menuju SNP 2	5.22	Menuju SNP 4
SMK	3.14	Menuju SNP 2	5.14	Menuju SNP 4
Rata-rata Capaian Provinsi Sulawesi Selatan	4.17	Menuju SNP 3	5.19	Menuju SNP 4



Grafik 3.1 Perbandingan capaian SNP per jenjang tahun 2016 dan 2017

Sementara itu, pelaksanaan fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pemberian bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan utamanya pada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dilaksanakan melalui Implementasi Kurikulum 2013 dan program sekolah model pada satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.

Pada tahun 2017 target implementasi kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3.195 sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dan dengan realisasi capaian sebesar 99,78%. Sementara fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan melalui program sekolah model dan dilaksanakan pada 480 sekolah yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian 20 sekolah model per kabupaten/kota dengan realisasi 100%.

Tingkat ketercapaian setiap indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan disajikan pada tabel berikut ini



Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LPMP Sulawesi Selatan
Tahun 2017

Indikator Kinerja		Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya		8952	9069	8655	95.43%
1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya.	99.30%	100%	97.69%	97.69%
2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya.	0.0%	40%	62%	155.00%
	Output : - Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	6363	6408	6260	97.69%
3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya.	98.17%	100%	93.46%	93.46%
4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya.	0.0%	60%	67%	111.67%
	Output : - Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	1606	1636	1529	93.46%
5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya.	96.55%	100%	88.10%	88.10%
6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya.	0.0%	60%	71%	118.33%
	Output : - Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	560	580	511	88.10%
7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya.	95.06%	80%	80.50%	100.62%
8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya.	0%	45%	75%	166.67%
	Output : - Satuan pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	423	445	355	79.78%



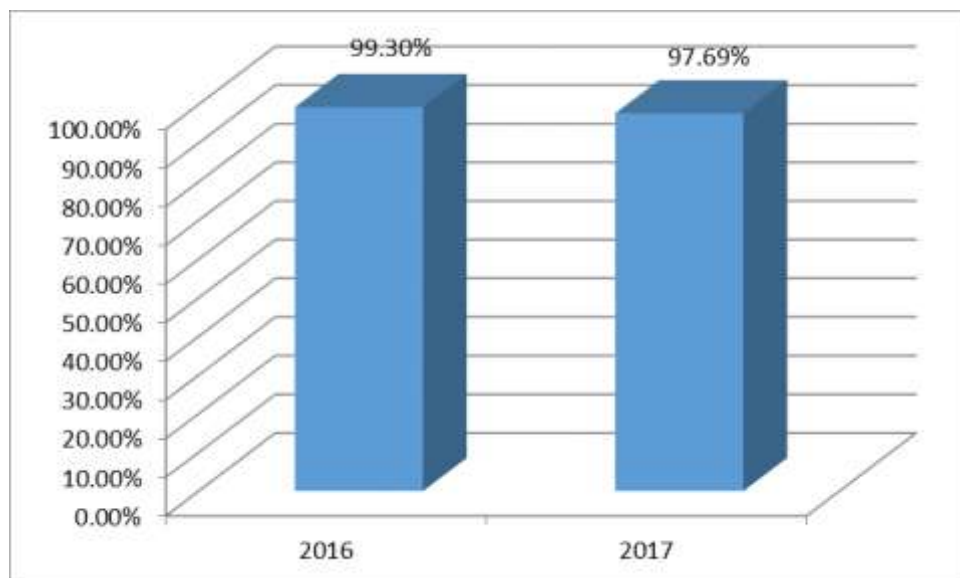
Indikator Kinerja		Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		2121	3681	3675	99.84%
9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	25%	40%	40.76%	101.90%
	Output :				
	- Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	295	343	369	107.58%
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)	1325	2249	2243	99.73%
10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	17.48%	40%	40.28%	100.70%
	Output :				
	- Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	39	63	61	96.83%
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)	247	598	598	100%
11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	21.90%	40%	39.14%	97.84%
	Output :				
	- Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	26	50	26	52%
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)	101	201	201	100%
12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	19.95%	40%	40.14%	100.34%
	Output :				
	- Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	24	24	24	100%
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK)	64	153	153	100%

Secara keseluruhan pencapaian semua indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

IKK 1. “Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Sulawesi Selatan”

Indikator kinerja persentase SD telah dipetakan mutu pendidikannya di Sulawesi Selatan pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 100%, yang berhasil terealisasi sebesar 97,69% atau 6.260 SD.

Persentase SD yang dipetakan mutunya pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah SD yang telah dipetakan mutunya sebanyak 6.363 sekolah, menurun menjadi 6.260 sekolah pada tahun 2017. Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya pada tahun 2016 dan 2017.



Grafik 3.2. Persentase jumlah SD yang dipetakan mutu pendidikannya tahun 2016 dan 2017

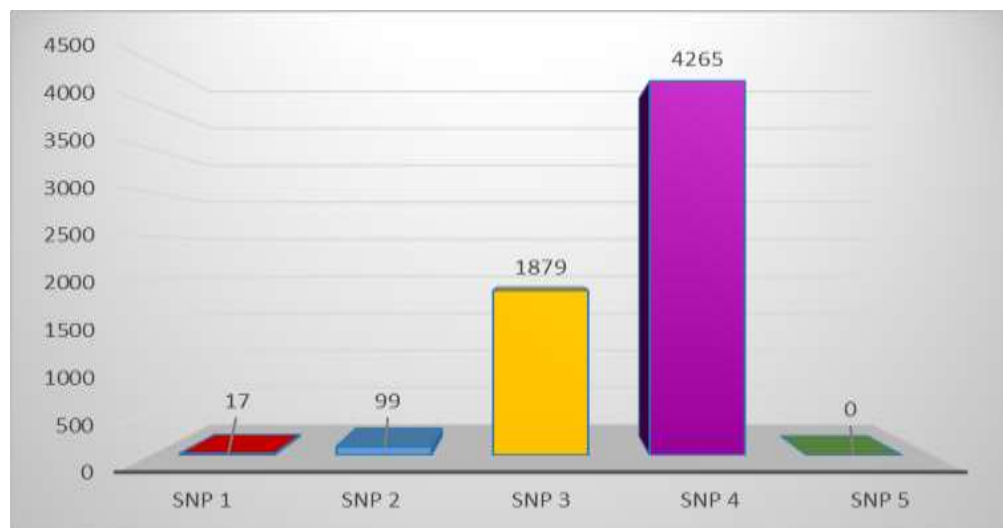
Menurunnya jumlah SD yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2017 disebabkan belum semua sekolah dasar mengirim data atau data sekolahnya sudah terkirim tapi belum terbaca oleh sistem sampai

batas akhir pengiriman data tanggal 20 Oktober 2017. Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan masih dalam tahap pengembangan di tahun kedua penggunaannya menyebabkan adanya error dan kehilangan data pada saat pengiriman data ke server pusat, akibatnya sekolah harus menginput kembali datanya. Ketersediaan sarana dan prasarana utamanya jaringan internet dan laptop dengan spesifikasi yang memadai turut mempengaruhi keterlambatan pengimputan dan pengiriman data tersebut.

Pelaksanaan pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SD terdiri dari tahapan kegiatan (1) Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan; (2) Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data; (3) Bimbingan teknis pengawas pemetaan mutu; (4) Pelaksanaan pengumpulan data; (5) Verifikasi dan validasi; (6) Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu; (7) Analisis data mutu; (8) Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu; dan (9) Diseminasi pemetaan mutu. Hasil pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan jenjang SD diuraikan sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Capaian Mutu

Berdasarkan data hasil PMP tahun 2017 diperoleh informasi jumlah Sekolah Dasar (SD) berdasarkan kategori capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:



Grafik 3.3 Jumlah satuan pendidikan berdasarkan kategori capaian SNP

Grafik 3.3 di atas menunjukkan bahwa dari total 6.260 SD yang terpetakan mutunya pada, sebanyak 4.265 sekolah berada pada capaian "Menuju SNP 4". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati SNP akan tetapi belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada SD yang capaian mutunya berada pada capaian " Menuju SNP 1 dan Menuju SNP 2".

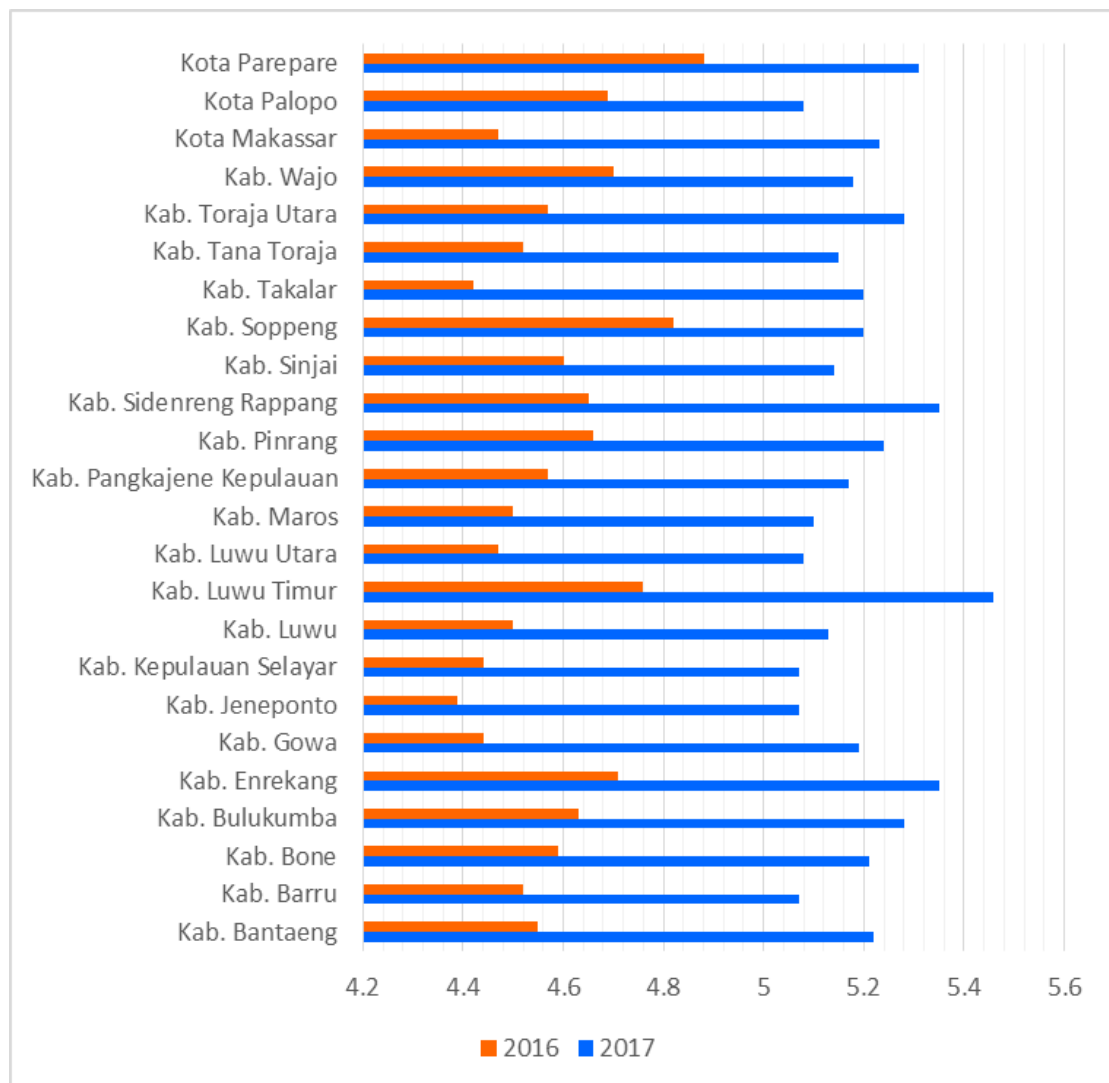
Capaian rata-rata mutu SNP jenjang SD tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Perbandingan peta capaian mutu SNP pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.3
Skor Peta Capaian SNP jenjang SD per kabupaten/kota

No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
1	Kab. Bantaeng	5.22	Menuju SNP 4	4.55	Menuju SNP 3
2	Kab. Barru	5.07	Menuju SNP 4	4.52	Menuju SNP 3
3	Kab. Bone	5.21	Menuju SNP 4	4.59	Menuju SNP 3
4	Kab. Bulukumba	5.28	Menuju SNP 4	4.63	Menuju SNP 3
5	Kab. Enrekang	5.35	Menuju SNP 4	4.71	Menuju SNP 3
6	Kab. Gowa	5.19	Menuju SNP 4	4.44	Menuju SNP 3
7	Kab. Jeneponto	5.07	Menuju SNP 4	4.39	Menuju SNP 3
8	Kab. Kepulauan Selayar	5.07	Menuju SNP 4	4.44	Menuju SNP 3
9	Kab. Luwu	5.13	Menuju SNP 4	4.5	Menuju SNP 3
10	Kab. Luwu Timur	5.46	Menuju SNP 4	4.76	Menuju SNP 3
11	Kab. Luwu Utara	5.08	Menuju SNP 4	4.47	Menuju SNP 3
12	Kab. Maros	5.1	Menuju SNP 4	4.5	Menuju SNP 3
13	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.17	Menuju SNP 4	4.57	Menuju SNP 3
14	Kab. Pinrang	5.24	Menuju SNP 4	4.66	Menuju SNP 3
15	Kab. Sidenreng Rappang	5.35	Menuju SNP 4	4.65	Menuju SNP 3
16	Kab. Sinjai	5.14	Menuju SNP 4	4.6	Menuju SNP 3
17	Kab. Soppeng	5.2	Menuju SNP 4	4.82	Menuju SNP 3



No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
18	Kab. Takalar	5.2	Menuju SNP 4	4.42	Menuju SNP 3
19	Kab. Tana Toraja	5.15	Menuju SNP 4	4.52	Menuju SNP 3
20	Kab. Toraja Utara	5.28	Menuju SNP 4	4.57	Menuju SNP 3
21	Kab. Wajo	5.18	Menuju SNP 4	4.7	Menuju SNP 3
22	Kota Makassar	5.23	Menuju SNP 4	4.47	Menuju SNP 3
23	Kota Palopo	5.08	Menuju SNP 4	4.69	Menuju SNP 3
24	Kota Parepare	5.31	Menuju SNP 4	4.88	Menuju SNP 3
Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sulawesi Selatan		5.20	Menuju SNP 4	4.59	Menuju SNP 3



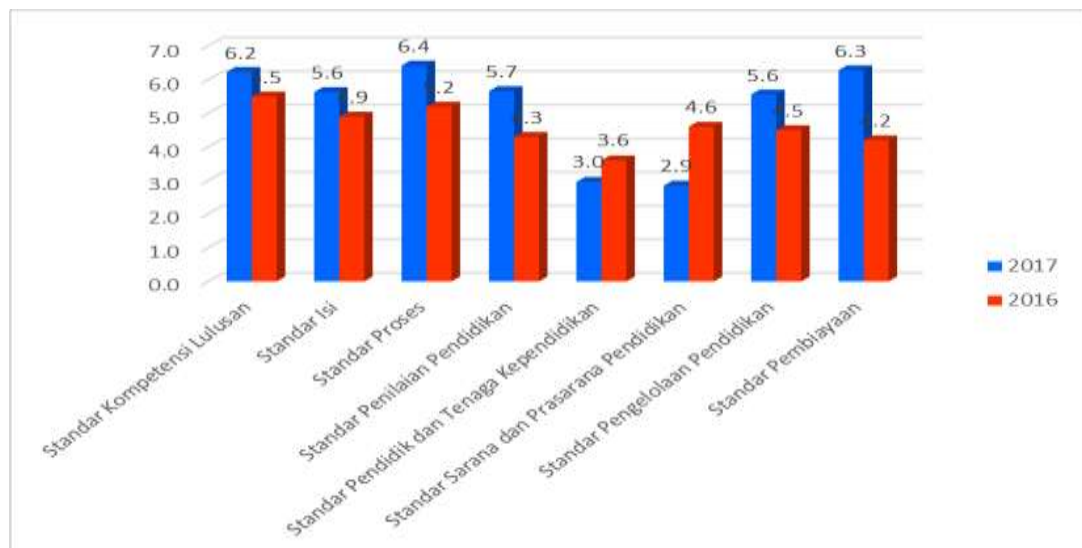
Grafik 3.4 Capaian SNP jenjang SD per kabupaten/kota

b. Capaian Mutu Per Standar

Perbandingan capaian mutu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SD di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan 2016 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Peta Capaian SNP Per Standar Jenjang SD

No.	Standar	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.2	Menuju SNP 4	5.5	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5.6	Menuju SNP 4	4.9	Menuju SNP 3
3	Standar Proses	6.4	Menuju SNP 4	5.2	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.7	Menuju SNP 4	4.3	Menuju SNP 3
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.0	Menuju SNP 2	3.6	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.9	Menuju SNP 2	4.6	Menuju SNP 3
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.6	Menuju SNP 4	4.5	Menuju SNP 3
8	Standar Pembiayaan	6.3	Menuju SNP 4	4.2	Menuju SNP 3



Grafik 3.5 Peta Capaian SNP jenjang SD per standar tahun 2017 dan 2016

Tabel dan grafik capaian mutu per standar diatas menunjukkan bahwa capaian mutu jenjang SD tahun 2017 paling baik adalah Standar Proses

dengan skor rata-rata 6.4, sedangkan capaian mutu terendah yaitu Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (2.9). Rendahnya capaian mutu Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan antara lain dikarenakan banyaknya sekolah yang belum mengisi data sarana dan prasana secara lengkap pada aplikasi Dapodik atau sudah mengisi tapi belum sepenuhnya terbaca oleh sistem.



Grafik 3.6. Perbandingan capaian SNP Nasional dan Provinsi jenjang SD

Berdasarkan grafik 3.6 diketahui bahwa capaian SNP jenjang SD tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan untuk semua standar secara rata-rata berada di kisaran capaian tingkat nasional.

c. Capaian mutu per indikator

Capaian mutu setiap indikator pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SD di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.5
Capaian Mutu Per Indikator Jenjang SD

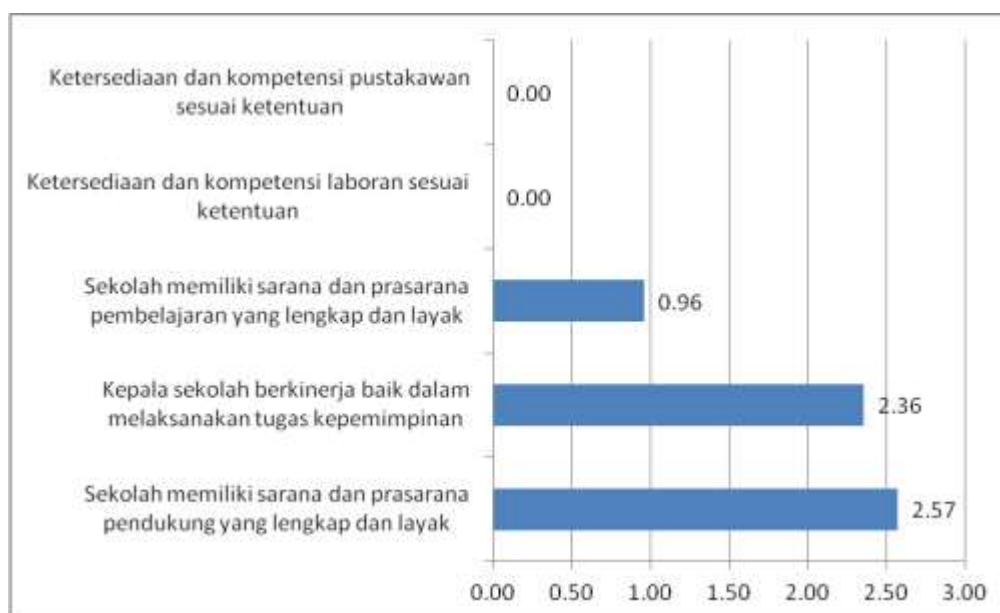
Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.82
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.77



Indikator	Capaian SNP
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.19
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.55
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.53
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.86
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.64
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.58
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.08
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	5.64
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.55
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.25
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.37
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.50
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.29
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	4.34
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	3.38
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	3.95
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	0.96
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.57
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.18
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.75
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.36

Indikator	Capaian SNP
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5.88
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.90
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.80
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	5.22

Berdasarkan hasil pengolahan data PMP tahun 2017, dari total 29 Indikator, diketahui ada 5 (lima) indikator dengan capaian terendah pada jenjang pendidikan SD di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Grafik 3.7. Lima Indikator SNP dengan Capaian Terendah jenjang SD

d. Hambatan dan kendala

Dalam pelaksanaan program pemetaan mutu pendidikan tahun 2017 jenjang pendidikan SD beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya kesadaran sekolah akan pentingnya pemetaan mutu pendidikan menyebabkan beberapa sekolah kurang responsive

2. terhadap program ini. Akibatnya pelaksanaan program berjalan tidak sesuai harapan.
3. Aplikasi yang digunakan masih berubah-ubah dan butir soal dan pertanyaannya sangat banyak, mengakibatkan responden jenuh dan menjawab pertanyaan tidak maksimal.
4. Masih ada beberapa standar SNP yang belum terbaca dengan baik oleh sistem sehingga data yang dihasilkan tidak valid.
5. Letak geografis beberapa sekolah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten/kota disertai dengan ketiadaan jaringan listrik maupun internet mengakibatkan lambatnya proses penginputan dan pengiriman data PMP ke server pusat.

e. Langkah antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar permasalahan seperti diatas tidak terjadi terulang kembali adalah :

1. Membangun komunikasi dan komitmen yang efektif oleh LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota dalam mengawal program Pemetaan Mutu Pendidikan ini secara bersama-sama sehingga tercapai hasil yang diinginkan bersama.
2. Diharapkan aplikasi PMP dan Dapodik sudah layak digunakan ketika program PMP sudah berjalan, sehingga meminimalisir kesalahan dan tidak terjadi kehilangan data akibat perubahan-perubahan tersebut.
3. Dukungan sistem pengolahan dan pembacaan data di aplikasi PMP sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang valid.
4. Perlu dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam membantu mengatasi kendala geografis dan tidak tersedianya perangkat yang diperlukan dalam pengiriman data PMP.



Dok 1. Siswa kelas V dan VI yang menjadi responden pengumpulan data mutu sedang menerima arahan tentang cara pengisian instrument pemetaan mutu pendidikan.

IKK 2. "Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya"

Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya sampai dengan tahun 2017 realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target 40%, realisasinya mencapai 62%. Berdasarkan hasil pengolahan data dalam aplikasi PMP tahun 2017 diketahui bahwa sebahagian besar SD telah mencapai kategori "menuju SNP 4", akan tetapi masih ada sekolah yang tetap pada capaiannya tahun lalu bahkan ada juga yang menurun tingkat capaian SNP-nya. Peningkatan Indeks efektivitas SD yang dipetakan mutunya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

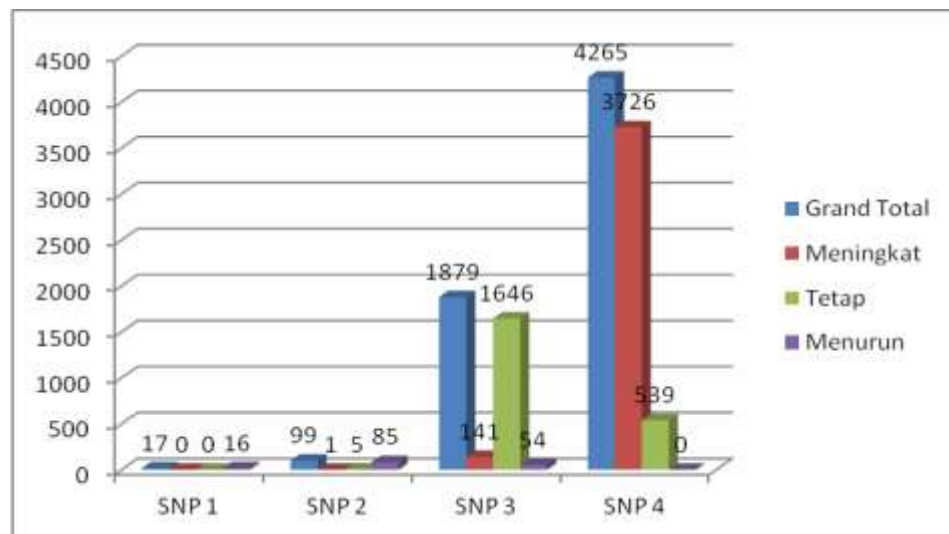
Tabel 3.6
Peningkatan Indeks Efektivitas Jenjang SD tahun 2017

Kategori	Capaian 2017								Grand Total
	-3	-2	-1	0	1	2	3	#N/A	
SNP 1	2	14	0	0	0	0	0	1	17
SNP 2	0	4	81	5	1	0	0	8	99
SNP 3	0	0	54	1646	48	93		38	1879

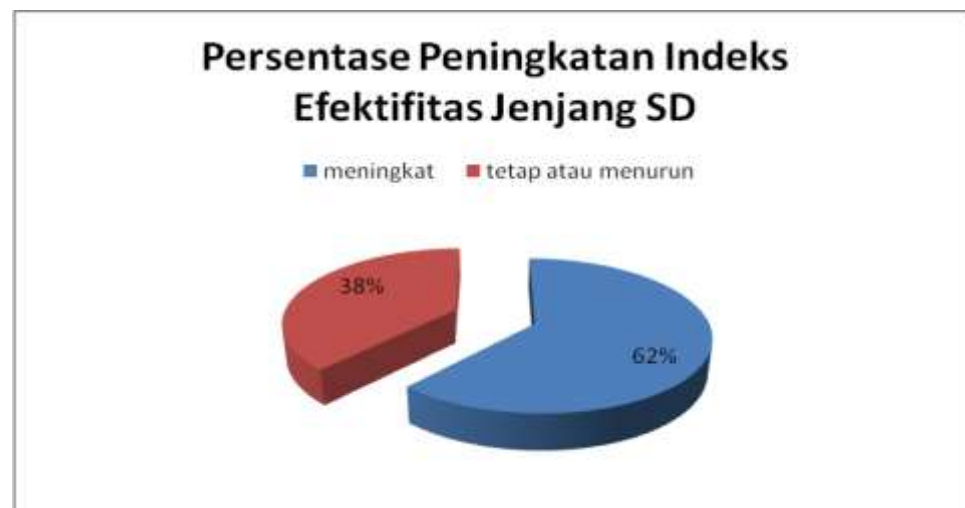
Kategori	Capaian 2017								Grand Total
	-3	-2	-1	0	1	2	3	#N/A	
SNP 4	0	0	0	539	3497	59	170	0	4265
Grand Total	2	18	135	2190	3546	152	170	47	6260

Keterangan :

- (-1, -2, -3) = Tingkat SNP menurun sesuai angka, mis -1; tingkat SNP sekolah menurun 1 tingkat.
- (0) = Tingkat tetap
- (1, 2, 3) = Tingkat SNP meningkat sesuai angka, mis 1; tingkat SNP sekolah meningkat 1 tingkat
- (#N/A) = Jumlah sekolah yang tidak dipetakan di tahun 2016



Grafik 3.8 Peningkatan Indeks Efektivitas Capaian SNP tahun 2017

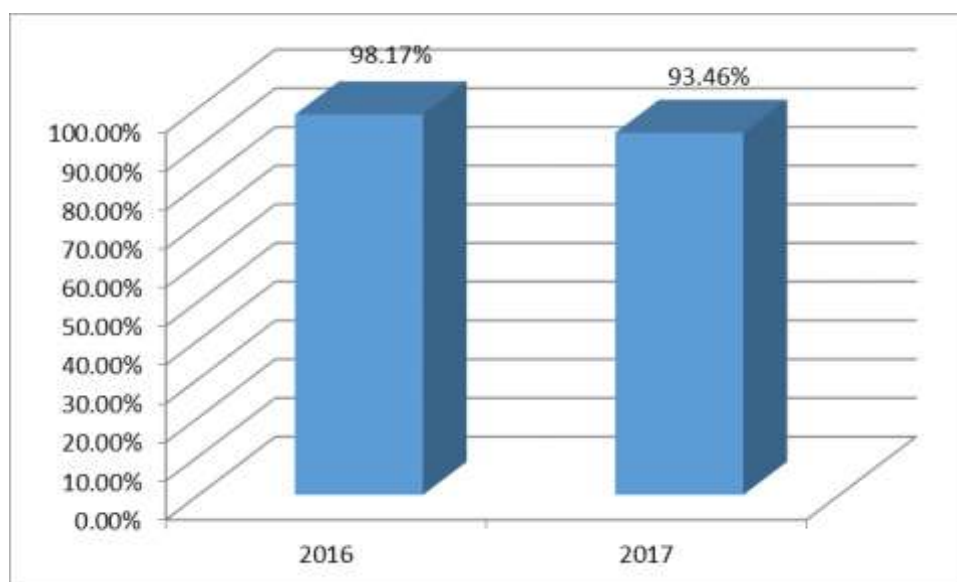


Grafik 3.9 Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas jenjang SD

IKK 3. "Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Sulawesi Selatan"

Tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase SMP telah dipetakan mutu pendidikannya di Sulawesi Selatan belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 100%, yang berhasil terealisasi sebesar 93,46% atau 1.529 sekolah.

Persentase SMP yang dipetakan mutunya pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah SMP yang telah dipetakan sebanyak 1.606 sekolah, menurun menjadi 1.529 sekolah pada tahun 2017. Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya pada tahun 2016 dan 2017.



Grafik 3.10 Persentase jumlah SMP yang dipetakan mutu pendidikannya

Menurunnya jumlah SMP yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2017, disebabkan belum semua sekolah mengirim data atau data sekolahnya sudah terkirim tapi belum terbaca oleh sistem sampai batas akhir pengiriman data tanggal 20 Oktober 2017. Belum sempurnanya aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) di tahun kedua penggunaannya

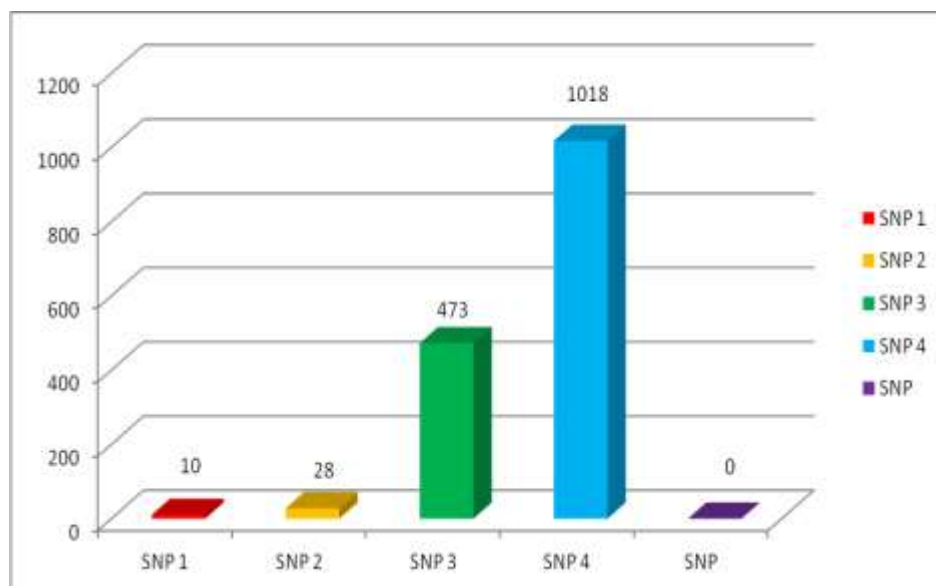
menyebabkan adanya error dan kehilangan data pada saat pengiriman ke server pusat akibatnya sekolah harus menginput kembali datanya.

Kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMP dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu (1) Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan; (2) Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data; (3) Bimbingan teknis pengawas pemetaan mutu; (4) Pelaksanaan pengumpulan data; (5) Verifikasi dan validasi; (6) Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu; (7) Analisis data mutu; (8) Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu; dan (9) Diseminasi pemetaan mutu.

Hasil pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP diuraikan sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Capaian Mutu

Berdasarkan data hasil PMP tahun 2017 diperoleh informasi jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan kategori capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:



Grafik 3.11 Jumlah SMP berdasarkan kategori capaian SNP

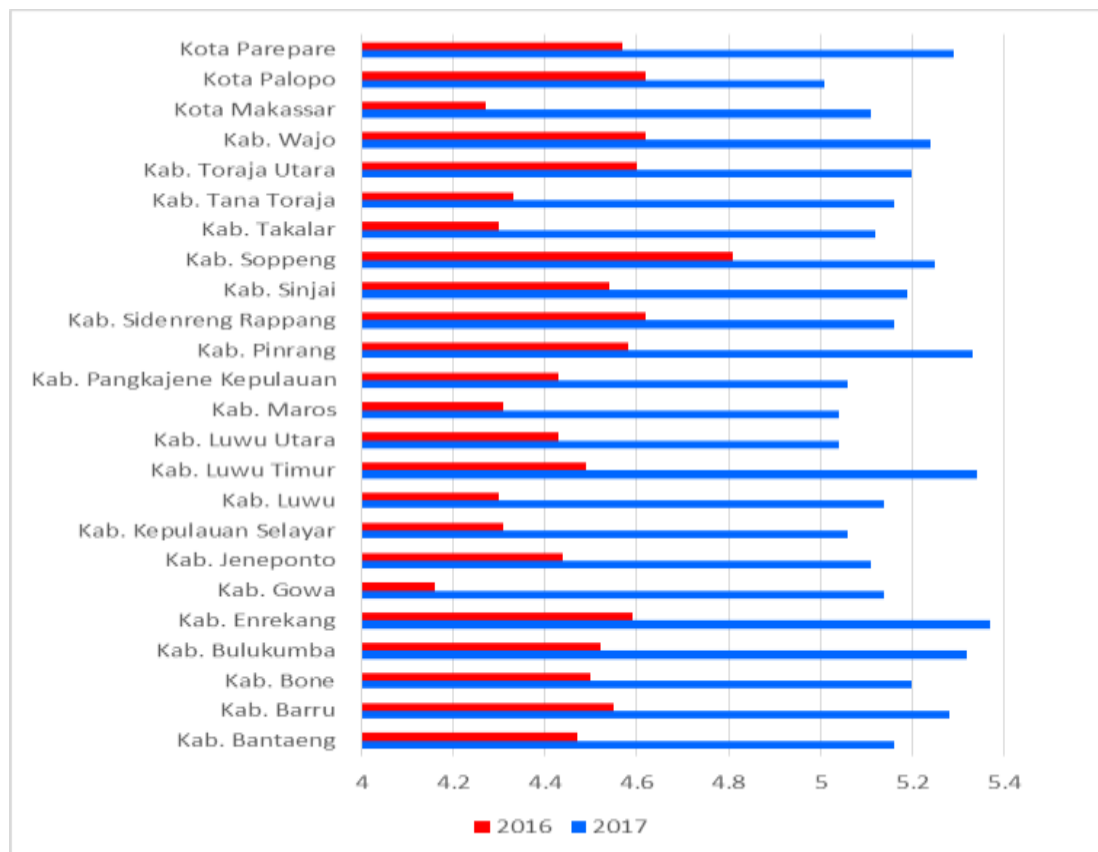
Grafik 3.11 di atas menunjukkan bahwa dari total 1.529 SMP yang telah dipetakan mutunya, sebanyak 1.018 sekolah berada pada capaian "Menuju SNP 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMP di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati SNP akan tetapi belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada sekolah yang capaian mutunya masih berada pada kategori "Menuju SNP 1" dan Menuju SNP2", yaitu sejumlah 38 sekolah.

Capaian mutu SNP jenjang SMP tahun 2017 pada 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan peta capaian mutu SNP pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.7
Skor Peta Capaian SNP jenjang SMP per kabupaten/kota

No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
1	Kab. Bantaeng	5.16	Menuju SNP 4	4.47	Menuju SNP 3
2	Kab. Barru	5.28	Menuju SNP 4	4.55	Menuju SNP 3
3	Kab. Bone	5.2	Menuju SNP 4	4.5	Menuju SNP 3
4	Kab. Bulukumba	5.32	Menuju SNP 4	4.52	Menuju SNP 3
5	Kab. Enrekang	5.37	Menuju SNP 4	4.59	Menuju SNP 3
6	Kab. Gowa	5.14	Menuju SNP 4	4.16	Menuju SNP 3
7	Kab. Jeneponto	5.11	Menuju SNP 4	4.44	Menuju SNP 3
8	Kab. Kepulauan Selayar	5.06	Menuju SNP 4	4.31	Menuju SNP 3
9	Kab. Luwu	5.14	Menuju SNP 4	4.3	Menuju SNP 3
10	Kab. Luwu Timur	5.34	Menuju SNP 4	4.49	Menuju SNP 3
11	Kab. Luwu Utara	5.04	Menuju SNP 3	4.43	Menuju SNP 3
12	Kab. Maros	5.04	Menuju SNP 3	4.31	Menuju SNP 3
13	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.06	Menuju SNP 4	4.43	Menuju SNP 3
14	Kab. Pinrang	5.33	Menuju SNP 4	4.58	Menuju SNP 3
15	Kab. Sidenreng Rappang	5.16	Menuju SNP 4	4.62	Menuju SNP 3
16	Kab. Sinjai	5.19	Menuju SNP 4	4.54	Menuju SNP 3
17	Kab. Soppeng	5.25	Menuju SNP 4	4.81	Menuju SNP 3

No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
18	Kab. Takalar	5.12	Menuju SNP 4	4.3	Menuju SNP 3
19	Kab. Tana Toraja	5.16	Menuju SNP 4	4.33	Menuju SNP 3
20	Kab. Toraja Utara	5.2	Menuju SNP 4	4.6	Menuju SNP 3
21	Kab. Wajo	5.24	Menuju SNP 4	4.62	Menuju SNP 3
22	Kota Makassar	5.11	Menuju SNP 4	4.27	Menuju SNP 3
23	Kota Palopo	5.01	Menuju SNP 3	4.62	Menuju SNP 3
24	Kota Parepare	5.29	Menuju SNP 4	4.57	Menuju SNP 3
Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan		5.18	Menuju SNP 4	4.47	Menuju SNP 3



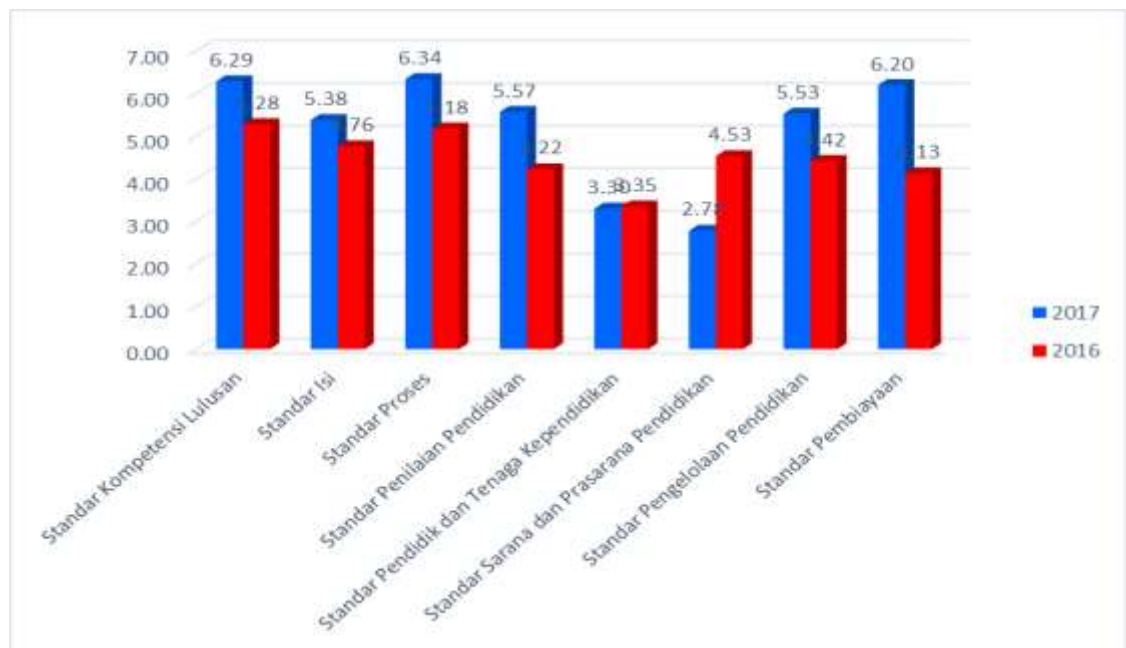
Grafik 3.12 Peta capaian rata-rata SNP per kabupaten/kota jenjang SMP

b. Capaian Mutu Per Standar

Perbandingan peta capaian mutu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Standar	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.29	Menuju SNP 4	5.28	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5.38	Menuju SNP 4	4.76	Menuju SNP 3
3	Standar Proses	6.34	Menuju SNP 4	5.18	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.57	Menuju SNP 4	4.22	Menuju SNP 3
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.30	Manuju SNP 2	3.35	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.78	Manuju SNP 2	4.53	Menuju SNP 3
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.53	Menuju SNP 4	4.42	Menuju SNP 3
8	Standar Pembiayaan	6.20	Menuju SNP 4	4.13	Menuju SNP 3



Grafik 3.13 Peta Capaian SNP jenjang SMP per standar tahun 2017 dan 2016

Tabel dan grafik capaian mutu per standar menunjukkan bahwa capaian mutu jenjang SMP pada tahun 2017 paling baik adalah Standar Proses dengan skor rata-rata 6.34, sedangkan capaian mutu terendah yaitu Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (2.78). Rendahnya capaian mutu standar sarana dan prasarana pendidikan antara lain dikarenakan banyaknya sekolah yang belum mengisi data sarana dan prasana secara

lengkap pada aplikasi Dapodik atau sudah mengisi tapi belum sepenuhnya terbaca oleh sistem.



Grafik 3.14. Perbandingan capaian SNP Nasional dan Provinsi jenjang SMP

Berdasarkan grafik 3.14 diketahui bahwa capaian SNP jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Selatan untuk semua standar secara rata-rata berada pada kisaran capaian tingkat nasional.

c. Capaian mutu per indikator

Capaian mutu setiap indikator pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Capaian Mutu Per Indikator

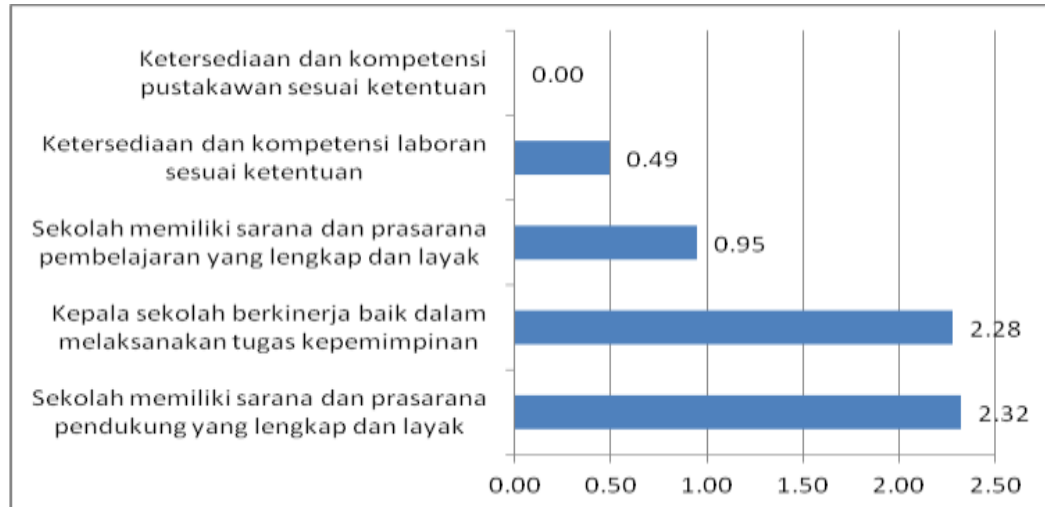
Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.78
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.72
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.39
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.99
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.56



Indikator	Capaian SNP
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.64
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.51
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.56
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.02
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	5.69
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.41
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.12
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.19
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.48
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.30
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	4.10
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.16
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.49
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	3.94
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	0.95
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.32
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.16
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.73
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.28
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5.85
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.89
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.67
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	5.17

Berdasarkan hasil pengolahan data PMP tahun 2017, dari total 29 Indikator, diketahui ada 5 (lima) indikator dengan capaian terendah

pada jenjang pendidikan SMP di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Grafik 3.15 Lima Indikator SNP dengan Capaian Terendah

d. Hambatan dan kendala

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SMP antara lain :

1. Kurangnya kesadaran sekolah akan pentingnya pemetaan mutu pendidikan menyebabkan beberapa sekolah kurang responsive terhadap program ini. Akibatnya pelaksanaan program berjalan tidak sesuai harapan.
2. Aplikasi yang digunakan masih dalam tahap pengembangan menyebabkan beberapa standar SNP belum terbaca dengan baik oleh sistem sehingga data yang dihasilkan tidak valid.
3. Masih ada sekolah yang belum memiliki jaringan internet, akibatnya proses penginputan dan pengiriman data PMP ke server pusat mengalami keterlambatan.

e. Langkah antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar permasalahan seperti diatas tidak terulang kembali adalah :

1. Membangun komunikasi dan komitmen yang efektif antara LPMP, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota dalam mengawal program Pemetaan Mutu Pendidikan ini secara bersama-sama sehingga tercapai hasil yang diinginkan bersama.
2. Mendorong tim pengembang aplikasi PMP segera menyempurnakan aplikasinya.
3. Perlu dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam membantu mengatasi kendala ketidaktersedian perangkat yang diperlukan dalam pengiriman data PMP.



Dok 2. Pemaparan materi oleh Fasilitator Nasional pada kegiatan Bimtek Pengawas Pengumpul Data PMP yang dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2017 bertempat Aula I LPMP Sulawesi Selatan

IKK 4. "Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya"

Hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2017, dari total 1.636 SMP di Sulawesi Selatan, sebanyak 93,46% sekolah yang telah dipetakan mutunya dan masih ada 6,54% sekolah yang belum dipetakan mutu pendidikannya. Hal ini disebabkan data yang sudah dikirim belum terbaca oleh sistem.

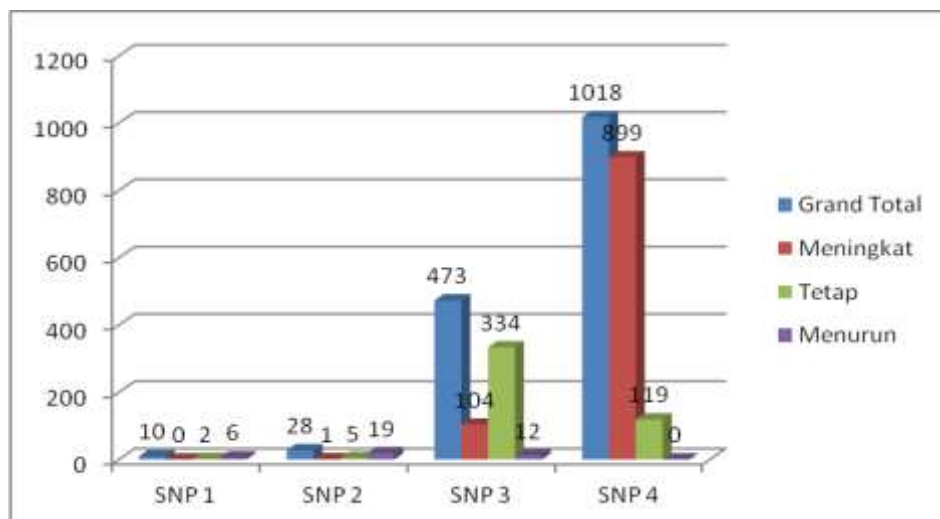
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut diketahui bahwa persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya sampai dengan tahun 2017 mencapai 67%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam renstra yaitu sebesar 40%. Pencapaian mutu SNP berdasarkan hasil dari aplikasi PMP diperoleh sebahagian besar SMP berada pada kategori capaian Menuju SNP 4, akan tetapi masih ada sekolah yang tetap pada capaiannya tahun sebelumnya bahkan masih ada juga sekolah yang menurun tingkat capaian SNP-nya.

Tabel 3.10
Tren Peningkatan indeks efektivitasnya jenjang SMP

Kategori	Capaian 2017							Grand Total
	-2	-1	0	1	2	3	#N/A	
SNP 1	6	0	2	0	0	0	2	10
SNP 2	0	19	5	1	0	0	3	28
SNP 3	0	12	334	24	80	0	23	473
SNP 4	0	0	119	720	25	154	0	1018
Grand Total	6	31	460	745	105	154	28	1529

Keterangan :

- (-1, -2, -3) = Tingkat SNP menurun sesuai angka, mis -1; tingkat SNP sekolah menurun 1 tingkat.
- (0) = Tingkat tetap
- (1, 2, 3) = Tingkat SNP meningkat sesuai angka, mis 1; tingkat SNP sekolah meningkat 1 tingkat
- (#N/A) = Jumlah sekolah yang tidak dipetakan di tahun 2016



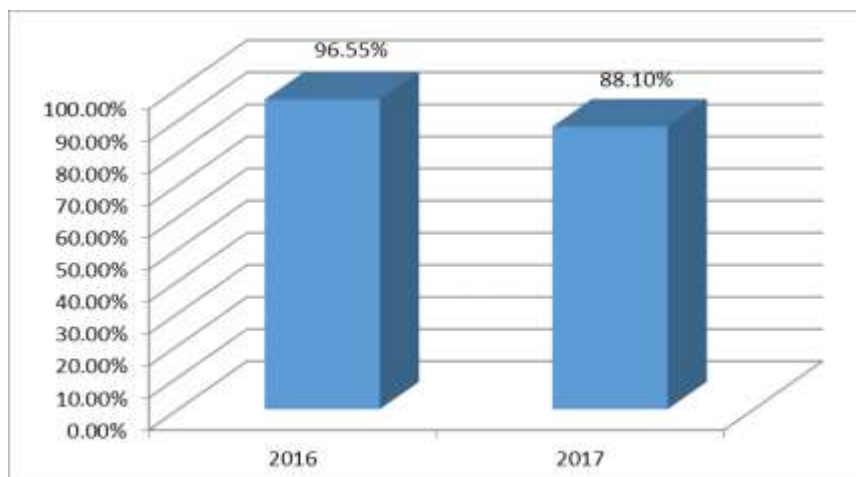
Grafik 3.16 Capaian peningkatan indeks efektivitas jenjang SMP



Grafik 3.17 Capaian peningkatan indeks efektivitas jenjang SMP

IKK 5. "Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Sulawesi Selatan"

Tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase SMA telah dipetakan mutu pendidikannya di Sulawesi Selatan belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 100%, yang berhasil terealisasi sebesar 88.10% atau 511 sekolah. Persentase SMA yang dipetakan mutunya pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah SMA yang telah dipetakan sebanyak 560 sekolah, menurun menjadi 511 sekolah pada tahun 2017. Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya pada tahun 2016 dan 2017.



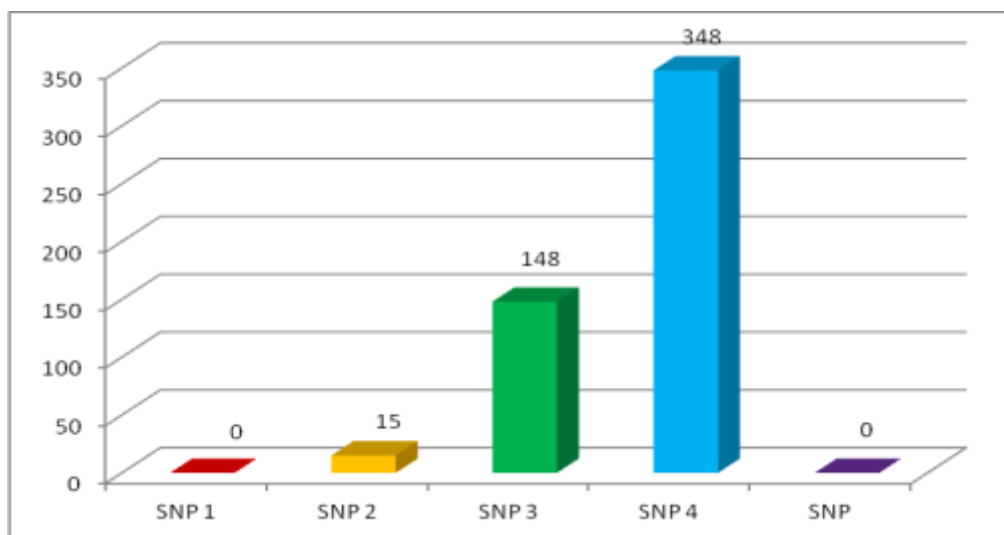
Grafik 3.18. Persentase jumlah SMA yang dipetakan mutu pendidikannya tahun 2016 dan 2017

Menurunnya jumlah SMA yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2017 antara lain disebabkan belum semua SMA mengirim datanya sampai batas akhir pengiriman data PMP pada tanggal 20 Oktober 2017. Selain itu, terdapat pula sekolah yang telah mengirim datanya akan tetapi belum terbaca oleh sistem. Belum sempunanya aplikasi PMP yang digunakan dalam pemetaan mutu juga menyebabkan adanya error kehilangan data.

Pelaksanaan kegiatan Pemetaan mutu satuan pendidikan jenjang SMA terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu (1) Rakor dan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan; (2) Bimbingan teknis fasilitator daerah pengumpulan data; (3) Bimbingan teknis pengawas pemetaan mutu; (4) Pelaksanaan pengumpulan data; (5) Verifikasi dan validasi; (6) Penyusunan peta mutu dan pengolahan data mutu; (7) Analisis data mutu; (8) Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu; dan (9) Diseminasi pemetaan mutu. Hasil pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA diuraikan sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Capaian Mutu

Berdasarkan data hasil pemetaan mutu pendidika tahun 2017 diperoleh informasi jumlah SMA berdasarkan kategori capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:



Grafik 3.19 Jumlah satuan pendidikan berdasarkan kategori capaian SNP

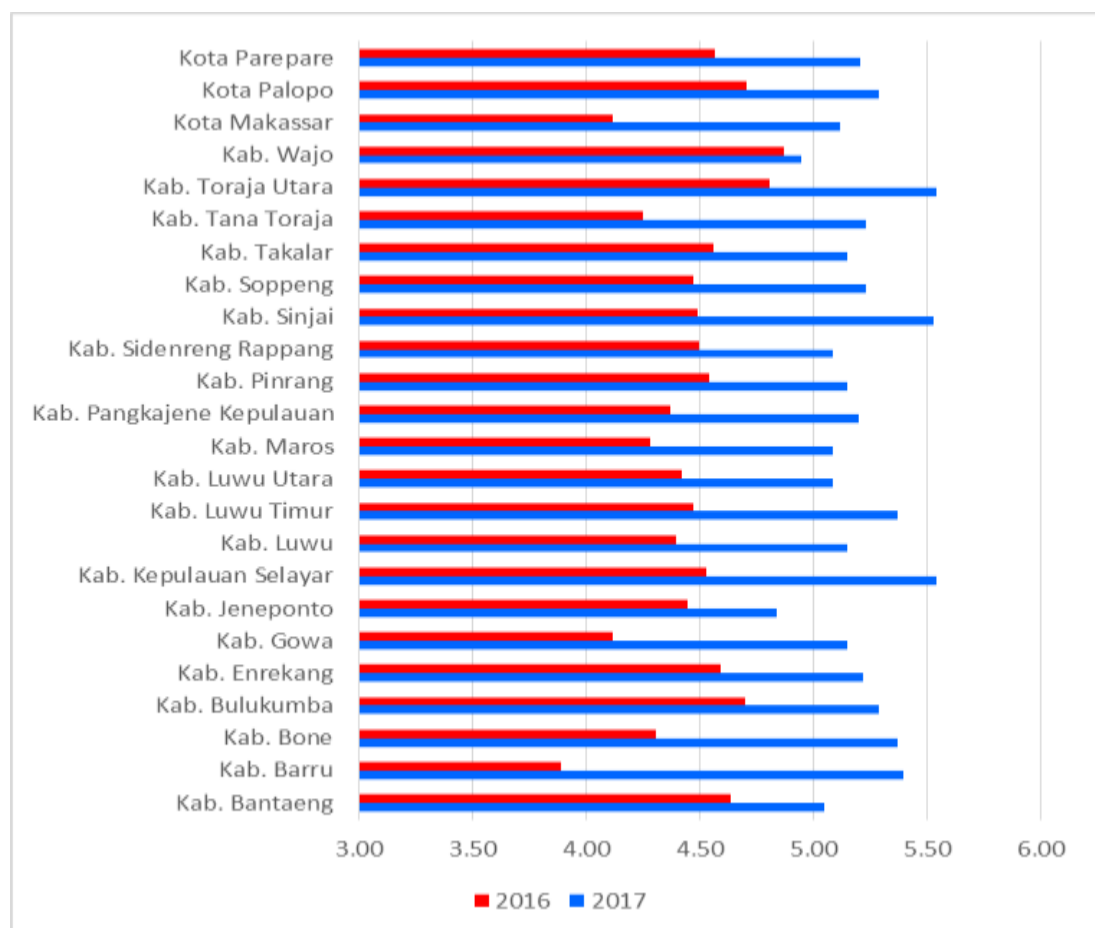
Grafik 3.19 di atas menunjukkan bahwa dari total 511 SMA yang telah dipetakan mutunya, sebanyak 348 sekolah berada pada capaian "Menuju SNP 4". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah menengah atas di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati SNP akan tetapi belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada sekolah yang capaian mutunya masih berada pada kategori "Menuju SNP 2" yaitu sebanyak 15 sekolah.

Capaian mutu SNP jenjang SMA tahun 2017 pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan peta capaian mutu SNP jenjang SMA pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.11
Peta capaian SNP per kabupaten/kota jenjang SMA

No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
1	Kab. Bantaeng	5.05	Menuju SNP 3	4.64	Menuju SNP 3
2	Kab. Barru	5.4	Menuju SNP 4	3.89	Menuju SNP 3
3	Kab. Bone	5.37	Menuju SNP 4	4.31	Menuju SNP 3
4	Kab. Bulukumba	5.29	Menuju SNP 4	4.7	Menuju SNP 3
5	Kab. Enrekang	5.22	Menuju SNP 4	4.59	Menuju SNP 3
6	Kab. Gowa	5.15	Menuju SNP 4	4.12	Menuju SNP 3
7	Kab. Jeneponto	4.84	Menuju SNP 3	4.45	Menuju SNP 3
8	Kab. Kepulauan Selayar	5.54	Menuju SNP 4	4.53	Menuju SNP 3
9	Kab. Luwu	5.15	Menuju SNP 4	4.4	Menuju SNP 3
10	Kab. Luwu Timur	5.37	Menuju SNP 4	4.47	Menuju SNP 3
11	Kab. Luwu Utara	5.09	Menuju SNP 4	4.42	Menuju SNP 3
12	Kab. Maros	5.09	Menuju SNP 4	4.28	Menuju SNP 3
13	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.2	Menuju SNP 4	4.37	Menuju SNP 3
14	Kab. Pinrang	5.15	Menuju SNP 4	4.54	Menuju SNP 3
15	Kab. Sidenreng Rappang	5.09	Menuju SNP 4	4.5	Menuju SNP 3
16	Kab. Sinjai	5.53	Menuju SNP 4	4.49	Menuju SNP 3
17	Kab. Soppeng	5.23	Menuju SNP 4	4.47	Menuju SNP 3
18	Kab. Takalar	5.15	Menuju SNP 4	4.56	Menuju SNP 3
19	Kab. Tana Toraja	5.23	Menuju SNP 4	4.25	Menuju SNP 3

No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
20	Kab. Toraja Utara	5.54	Menuju SNP 4	4.81	Menuju SNP 3
21	Kab. Wajo	4.95	Menuju SNP 3	4.87	Menuju SNP 3
22	Kota Makassar	5.12	Menuju SNP 4	4.12	Menuju SNP 3
23	Kota Palopo	5.29	Menuju SNP 4	4.71	Menuju SNP 3
24	Kota Parepare	5.21	Menuju SNP 4	4.57	Menuju SNP 3
Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan		5.22	Menuju SNP 4	4.46	Menuju SNP 3



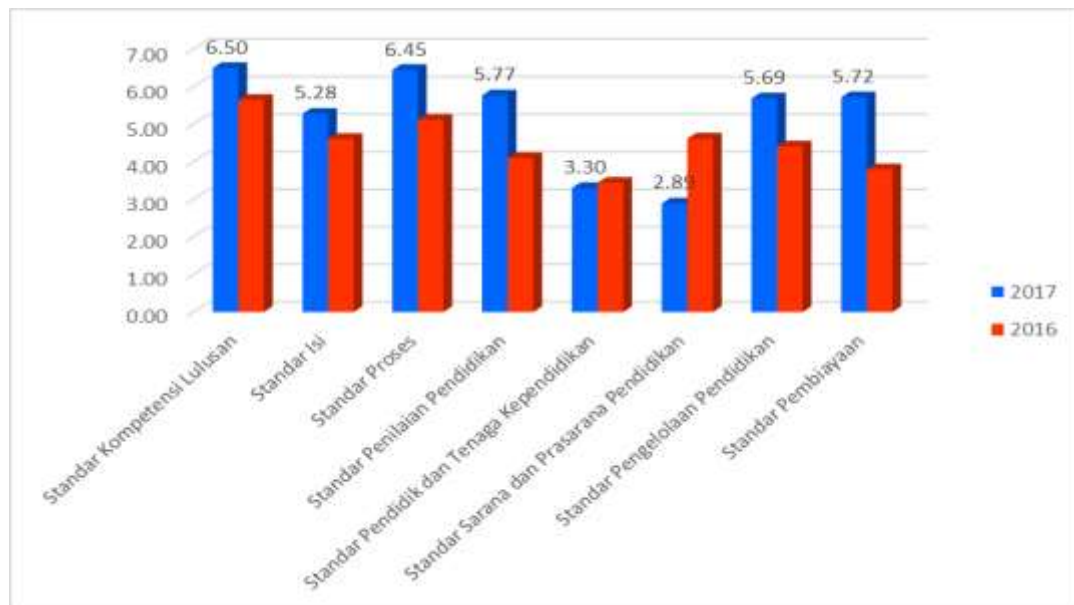
Grafik 3.20 Peta capaian rata-rata SNP per kabupaten/kota jenjang SMA

b. Capaian Mutu Per Standar

Capaian mutu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan

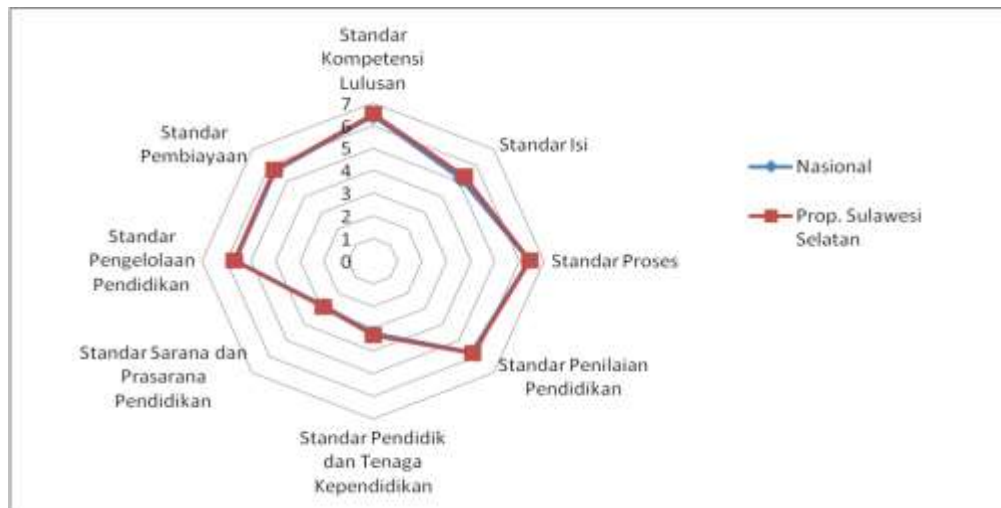
No.	Standar	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.50	Menuju SNP 4	5.65	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5.28	Menuju SNP 4	4.61	Menuju SNP 3
3	Standar Proses	6.45	Menuju SNP 4	5.12	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.77	Menuju SNP 4	4.1	Menuju SNP 3
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.30	Menuju SNP 2	3.44	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.89	Menuju SNP 2	4.62	Menuju SNP 3
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.69	Menuju SNP 4	4.41	Menuju SNP 3
8	Standar Pembiayaan	5.72	Menuju SNP 4	3.8	Menuju SNP 3



Grafik 3.21 Peta Capaian SNP jenjang SMA per standar tahun 2017 dan 2016

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa capaian mutu jenjang SMA paling baik adalah Standar Kompetensi Lulusan dengan skor rata-rata 6.5, sedangkan capaian mutu terendah yaitu Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (2.89). Rendahnya capaian mutu Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan antara lain dikarenakan banyaknya sekolah yang

belum mengisi data sarana dan prasana secara lengkap pada aplikasi Dapodik atau sudah mengisi tapi belum sepenuhnya terbaca oleh sistem.



Grafik 3.22 Perbandingan capaian SNP Nasional dan Provinsi jenjang SMA

Berdasarkan grafik 3.22 diketahui bahwa capaian SNP jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Selatan untuk semua standar secara rata-rata berada di kisaran capaian tingkat nasional.

c. Capaian mutu per indikator

Capaian mutu setiap indikator pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 3.13 berikut:

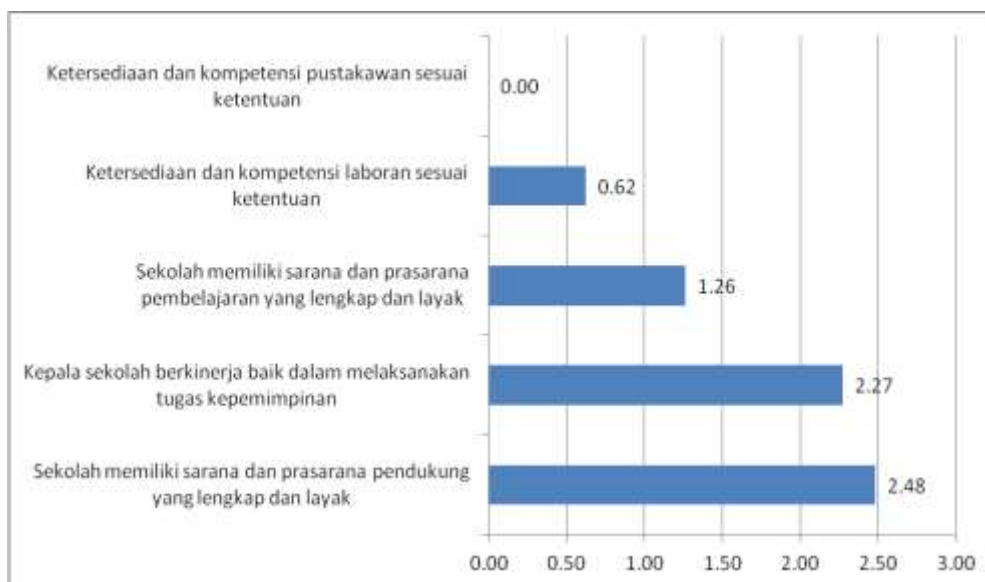
Tabel 3.13
Capaian Mutu Per Indikator

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.84
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5.33
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.58
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.99
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.68



Indikator	Capaian SNP
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.17
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.54
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.68
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.16
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	5.79
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.56
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.21
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.40
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.90
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.36
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	3.94
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.28
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.62
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	3.93
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	1.26
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.48
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.23
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.16
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.27
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5.87
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.77
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.69
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.94

Berdasarkan hasil pengolahan data PMP tahun 2017, dari total 29 Indikator, diketahui ada 5 (lima) indikator dengan capaian terendah pada jenjang pendidikan SMA di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Grafik 3.23. Lima Indikator SNP dengan Capaian Terendah

d. Hambatan dan kendala

Dalam pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SMA beberapa hambatan dan permasalahan antara lain : (1) Berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana SD dan SMP dikelola oleh Pemerintah kabupaten/Kota dan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi berakibat pada pola interaksi LPMP dengan Dinas Pendidikan Provinsi, (2) kurangnya kesadaran sekolah akan pentingnya pemetaan mutu pendidikan menyebabkan beberapa sekolah kurang responsive terhadap program ini. Akibatnya pelaksanaan program berjalan tidak sesuai harapan, (2) aplikasi yang digunakan masih dalam tahap pengembangan.

e. Langkah antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar permasalahan seperti diatas tidak terjadi terulang kembali adalah : (1) Membangun

komunikasi dan komitmen yang efektif oleh LPMP, Diknas Propinsi, Pengawas, dan satuan pendidikan di kab/kota dalam mengawal program Pemetaan Mutu Pendidikan ini secara bersama-sama sehingga tercapai hasil yang diinginkan bersama, (2) Diharapkan aplikasi PMP sudah layak digunakan ketika program PMP sudah berjalan, sehingga meminimalisir kesalahan dan tidak terjadi kehilangan data lagi akibat perubahan-perubahan tersebut, (3) Dukungan sistem pengolahan dan pembacaan data di aplikasi PMP sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang valid.



Dok 3. Pengawas Pengumpul Data Mutu melakukan telaah instrument pemetaan mutu pendidikan pada kegiatan Bimtek Fasilitaor Daerah

IKK 6. "Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya"

Pada tahun 2017, dari total 580 SMA yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berhasil dipetakan mutunya sebanyak 511 sekolah dan masih ada 69 sekolah yang sudah mengirim namun belum terbaca oleh sistem.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diketahui persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya sampai dengan tahun 2017 mencapai 71%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam renstra

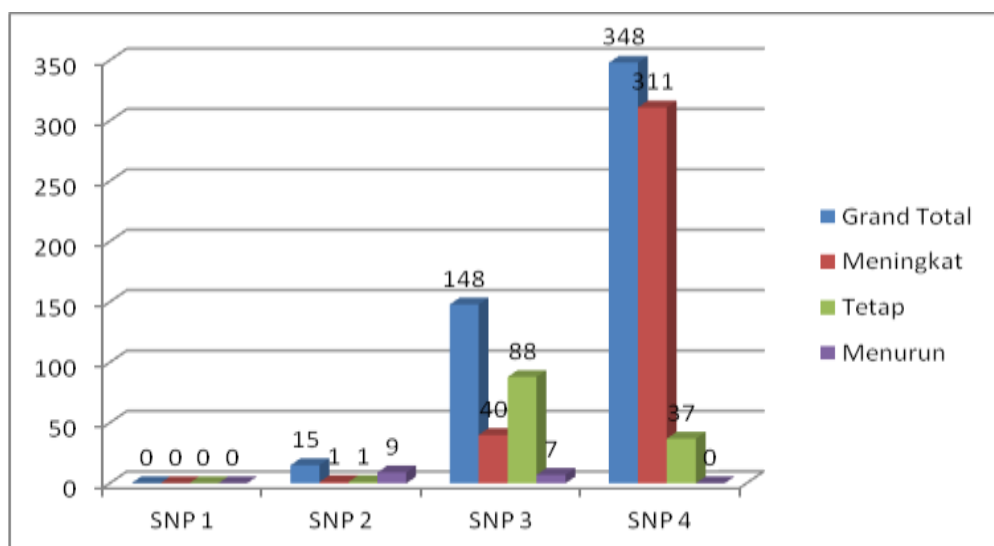
sebesar 60% dengan persentase capaian 118.33%. Berdasarkan hasil pemetaan mutu dengan menggunakan aplikasi PMP diketahui bahwa sebahagian besar SMA berada pada kategori capaian menuju SNP 4, tapi masih ada sekolah yang tetap pada capaiannya tahun lalu bahkan ada juga sekolah yang menurun tingkat capaian SNP-nya yaitu sebanyak 29%.

Tabel 3.14
Tren Peningkatan indeks efektivitasnya jenjang SMA

Kategori	Capaian 2017						Grand Total
	-1	0	1	2	3	#N/A	
SNP 1	0	0	0	0	0	0	0
SNP 2	9	1	1	0	0	4	15
SNP 3	7	88	10	30		13	148
SNP 4	0	37	207	20	84	0	348
Grand Total	16	126	218	50	84	17	511

Ket :

- (-1, -2, -3) = Tingkat SNP menurun sesuai angka, mis -1; tingkat SNP sekolah menurun 1 tingkat.
- (0) = Tingkat tetap
- (1, 2, 3) = Tingkat SNP meningkat sesuai angka, mis 1; tingkat SNP sekolah meningkat 1 tingkat
- (#N/A) = Jumlah sekolah yang tidak dipetakan di tahun 2016



Grafik 3.24 Capaian peningkatan indeks efektivitas jenjang SMA

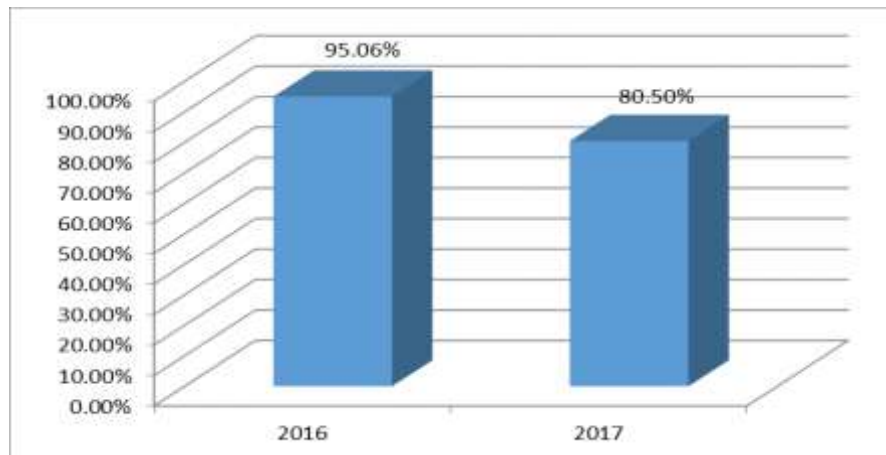


Grafik 3.25 Persentase peningkatan indeks efektivitas jenjang SMA

IKK 7. "Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya di Sulawesi Selatan"

Realisasi kinerja persentase SMK yang dipetakan mutu pendidikannya pada tahun 2017 mencapai 80.50% dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian 100.62%. Capaian tersebut dapat melampaui target yang ditetapkan karena adanya perubahan jumlah total SMK di Sulawesi Selatan dari 445 sekolah menjadi 441 sekolah pada semester akhir tahun 2017.

Meskipun capaian realisasi persentase SMK yang dipetakan mutunya pada tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, akan tetapi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah SMK yang telah dipetakan sebanyak 423 sekolah, menurun menjadi 355 sekolah pada tahun 2017. Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya pada tahun 2016 dan 2017.

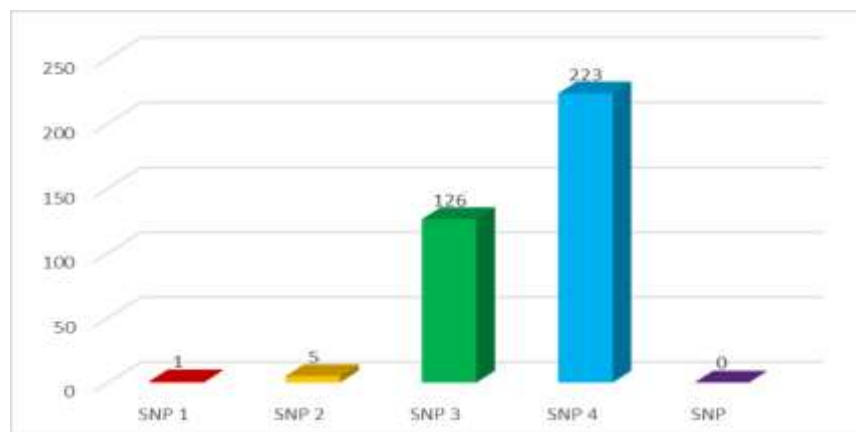


Grafik 3.26 Perbandingan persentase jumlah SMK yang dipetakan mutu pendidikannya tahun 2016 dan 2017

Menurunnya jumlah SMK yang berhasil dipetakan mutu pendidikannya di tahun 2017, disebabkan belum semua SMK mengirim data ke server pusat sampai batas akhir pengiriman tanggal 20 Oktober 2017. Di tahun kedua penggunaannya, aplikasi PMP masih dalam tahap pengembangan dan mengalami perubahan-perubahan yang terkadang menyebabkan adanya error dan kehilangan data, akibatnya sekolah harus menginput kembali datanya. Hasil pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan jenjang SMK diuraikan sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Capaian Mutu

Berdasarkan data hasil PMP tahun 2017 diperoleh informasi jumlah SMK berdasarkan kategori capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut :



Grafik 3.27 Jumlah SMK berdasarkan kategori capaian SNP

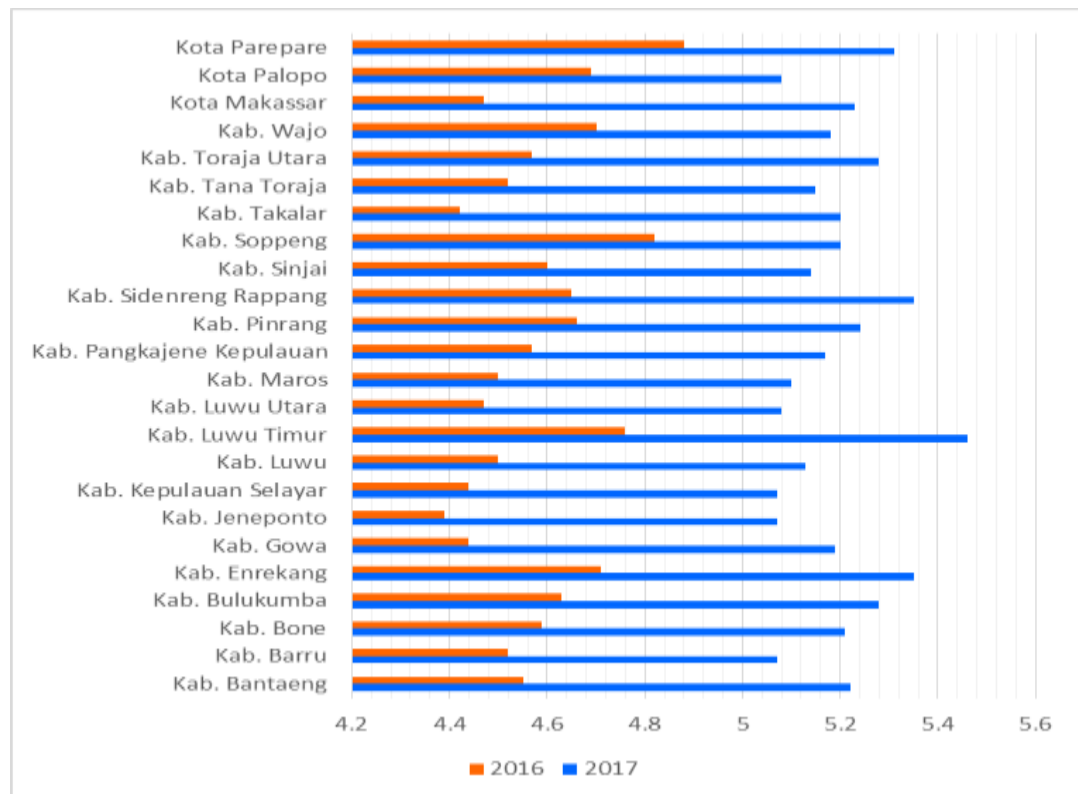
Grafik 3.27 di atas menunjukkan bahwa dari total 355 SMK yang dipetakan mutunya, sebanyak 223 sekolah berada pada capaian "Menuju SNP 4". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati SNP akan tetapi belum ada yang mencapai SNP. Bahkan masih ada sekolah menengah kejuruan yang capaian mutunya masih jauh dari yang diharapkan yaitu sejumlah 6 sekolah menengah kejuruan.

Capaian mutu SNP jenjang SMK tahun 2017 pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perbandingan peta capaian mutu SNP jenjang SMK pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.15
Capaian SNP jenjang SMK per kabupaten/kota

No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
1	Kab. Bantaeng	4.95	Menuju SNP 3	4.01	Menuju SNP 3
2	Kab. Barru	5.23	Menuju SNP 4	4.61	Menuju SNP 3
3	Kab. Bone	5.18	Menuju SNP 4	4.13	Menuju SNP 3
4	Kab. Bulukumba	5.43	Menuju SNP 4	4.37	Menuju SNP 3
5	Kab. Enrekang	5.5	Menuju SNP 4	4.04	Menuju SNP 3
6	Kab. Gowa	5.25	Menuju SNP 4	4.01	Menuju SNP 3
7	Kab. Jeneponto	5.15	Menuju SNP 4	4.12	Menuju SNP 3
8	Kab. Kepulauan Selayar	5.07	Menuju SNP 4	3.92	Menuju SNP 3
9	Kab. Luwu	5.06	Menuju SNP 4	3.9	Menuju SNP 3
10	Kab. Luwu Timur	5.46	Menuju SNP 4	4.05	Menuju SNP 3
11	Kab. Luwu Utara	4.9	Menuju SNP 3	4.04	Menuju SNP 3
12	Kab. Maros	4.86	Menuju SNP 3	3.7	Menuju SNP 3
13	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.04	Menuju SNP 3	4.43	Menuju SNP 3
14	Kab. Pinrang	5	Menuju SNP 3	4.18	Menuju SNP 3
15	Kab. Sidenreng Rappang	5.07	Menuju SNP 4	4.2	Menuju SNP 3
16	Kab. Sinjai	5.02	Menuju SNP 3	4.04	Menuju SNP 3

No.	Kabupaten/Kota	2017		2016	
		Skor Rata-Rata	Kriteria	Skor Rata-Rata	Kriteria
17	Kab. Soppeng	5.26	Menuju SNP 4	4.38	Menuju SNP 3
18	Kab. Takalar	5.32	Menuju SNP 4	4.5	Menuju SNP 3
19	Kab. Tana Toraja	5.12	Menuju SNP 4	4.12	Menuju SNP 3
20	Kab. Toraja Utara	5.18	Menuju SNP 4	4	Menuju SNP 3
21	Kab. Wajo	5.03	Menuju SNP 3	4.43	Menuju SNP 3
22	Kota Makassar	5.1	Menuju SNP 4	3.87	Menuju SNP 3
23	Kota Palopo	5.14	Menuju SNP 4	3.85	Menuju SNP 3
24	Kota Parepare	5.11	Menuju SNP 4	4.38	Menuju SNP 3
Rata-Rata Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan		5.14	Menuju SNP 4	4.14	Menuju SNP 3



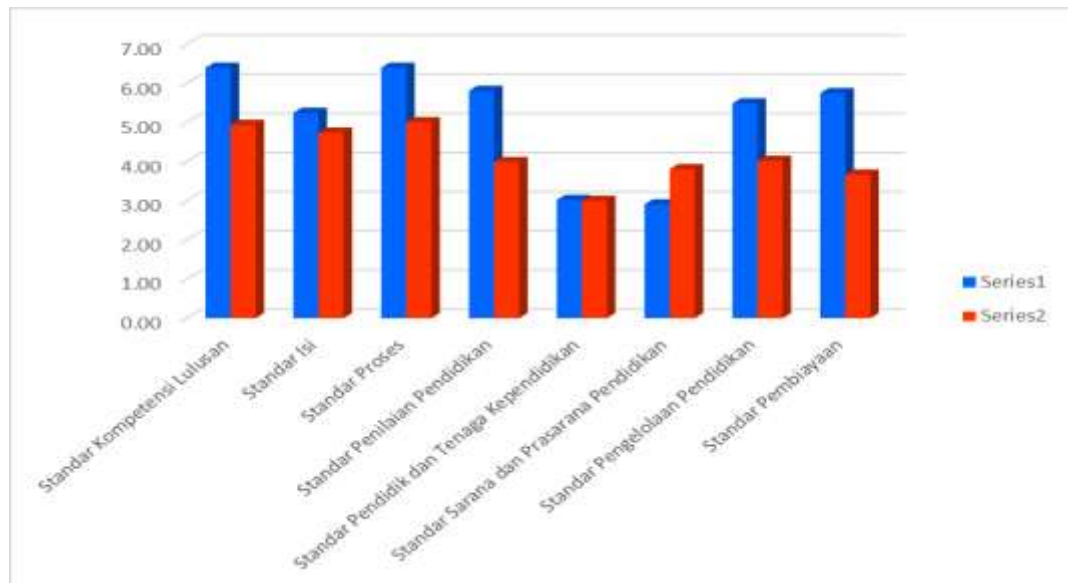
Grafik 3.28 Peta capaian SNP per kabupaten/kota jenjang SMK

b. Capaian Mutu Per Standar

Capaian mutu pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SMK di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Capaian SNP per standar jenjang SMK

No	Standar	Skor Rata-rata	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.4	Menuju SNP 4
2	Standar Isi	5.25	Menuju SNP 4
3	Standar Proses	6.4	Menuju SNP 4
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.81	Menuju SNP 4
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.02	Menuju SNP 2
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.91	Menuju SNP 2
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.49	Menuju SNP 4
8	Standar Pembiayaan	5.75	Menuju SNP 4



Grafik 3.29 Peta Capaian SNP jenjang SMA per standar tahun 2017 dan 2016

Grafik 3. 29 menunjukkan bahwa capaian mutu jenjang SMK tahun 2017 paling baik adalah Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses dengan skor rata-rata 6.4, sedangkan capaian mutu terendah yaitu Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (2.91). Rendahnya capaian mutu Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan antara lain dikarenakan banyaknya sekolah yang belum mengisi data sarana dan prasana secara lengkap pada aplikasi Dapodik atau kemungkinan tidak terbaca oleh sistem.



Grafik 3.30 Perbandingan capaian SNP Nasional dan Provinsi jenjang SMK

Berdasarkan grafik 3.4 diketahui bahwa capaian SNP jenjang SMK di Provinsi Sulawesi Selatan untuk semua standar secara rata-rata berada di kisaran capaian tingkat nasional.

a. Capaian mutu per indikator

Capaian mutu setiap indikator pada masing-masing Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang SMK di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Capaian Mutu Per Indikator

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.83
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.68
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.60
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.98
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.70
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.10
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.52
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.66



Indikator	Capaian SNP
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.07
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.36
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.50
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.07
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.34
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.81
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.08
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	3.56
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	4.93
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.49
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	3.97
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	1.31
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.46
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.05
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.85
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	1.65
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5.91
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.94
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.63
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.90

Berdasarkan hasil pengolahan data PMP tahun 2017, dari total 29 Indikator, diketahui ada 5 (lima) indikator dengan capaian terendah pada jenjang pendidikan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Grafik 3.31 Lima Indikator SNP dengan Capaian Terendah

b. Hambatan dan kendala

Dalam pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2017 untuk jenjang pendidikan SMP beberapa hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran sekolah akan pentingnya pemetaan mutu pendidikan menyebabkan beberapa sekolah kurang responsive terhadap program ini. Akibatnya pelaksanaan program berjalan tidak sesuai harapan.
2. Aplikasi yang digunakan masih berubah-ubah dan butir soal dan pertanyaannya sangat banyak, mengakibatkan responden jenuh dan menjawab pertanyaan tidak maksimal.
3. Masih ada beberapa standar SNP yang belum terbaca dengan baik oleh sistem sehingga data yang dihasilkan tidak valid.

c. Langkah antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar permasalahan seperti diatas tidak terjadi terulang kembali adalah :

1. Membangun komunikasi dan komitmen yang efektif oleh LPMP, Diknas Propinsi, Diknas Kab/Kota, Pengawas, dan satuan

pendidikan di kab/kota dalam mengawal program Pemetaan Mutu Pendidikan ini secara bersama-sama sehingga tercapai hasil yang diinginkan bersama.

2. Diharapkan aplikasi PMP dan Dapodik sudah layak digunakan ketika program PMP sudah berjalan, sehingga meminimalisir kesalahan dan tidak terjadi kehilangan data lagi akibat perubahan-perubahan tersebut.
3. Dukungan sistem pengolahan dan pembacaan data di aplikasi PMP sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang valid.



Dok. 4 Pemaparan laporan rekomendasi mutu pendidikan oleh tim penyusun pada kegiatan penyusunan rekomendasi peningkatan mutu yang dilaksanakan di Aula 1 LPMP Sulawesi Selatan pada tanggal 28 s.d. 30 Desember 2017

IKK 8. "Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya"

Sekolah jenjang SMK yang telah dipetakan mutunya pada tahun 2017 sebanyak 355 sekolah total 441 sekolah keseluruhan, masih ada 19,50% sekolah yang sudah mengirim namun belum terbaca oleh sistem.

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2017, persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya sampai dengan tahun 2017 mencapai 75%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam renstra sebesar 45%. Di tahun kedua pencapaian mutu SNP berdasarkan hasil

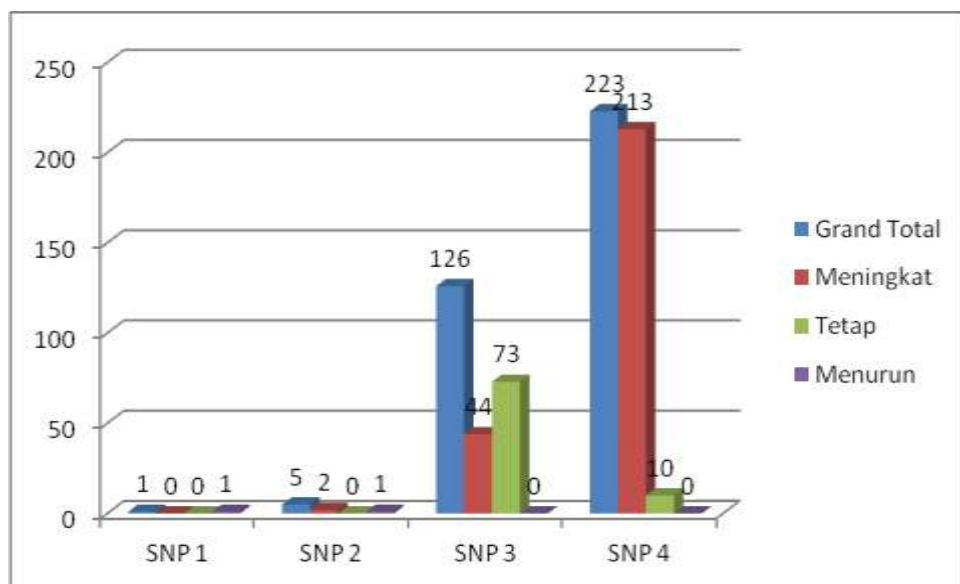
dari aplikasi PMP diperoleh sebahagian besar sekolah menengah atas yang telah mencapai SNP 4, ada sekolah yang tetap pada capaiannya tahun lalu namun ada juga sekolah yang menurun tingkat capaian SNP-nya sebanyak 25%.

Tabel 3.18
Presentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya.

Kategori	Capaian 2017							Grand Total
	-2	-1	0	1	2	3	#N/A	
SNP 1	1	0	0	0	0	0	0	1
SNP 2	0	1	0	2	0	0	2	5
SNP 3	0	0	73	17	27	0	9	126
SNP 4	0	0	10	131	24	58	0	223
Grand Total	1	1	83	150	51	58	11	355

Ket :

- (-1, -2, -3) = Tingkat SNP menurun sesuai angka, mis -1; tingkat SNP sekolah menurun 1 tingkat.
- (0) = Tingkat tetap
- (1, 2, 3) = Tingkat SNP meningkat sesuai angka, mis 1; tingkat SNP sekolah meningkat 1 tingkat
- (#N/A) = Jumlah sekolah yang tidak dipetakan di tahun 2016



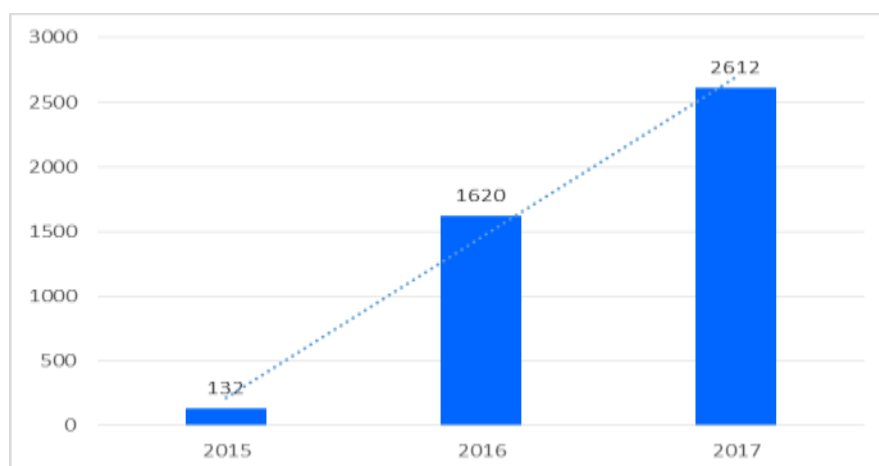
Grafik. 3.32 Capaian peningkatan indeks efektivitas jenjang SMK



Grafik. 3.33 Persentase peningkatan indeks efektivitas jenjang SMK

IKK 9. "Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 mencapai 40.76% dari target yang ditetapkan sebesar 40% dengan persentase capaian 101.90%. Capaian tersebut dapat melampaui target yang ditetapkan karena beberapa hal antara lain : (1) realisasi kegiatan program sekolah model sebanyak 369 sekolah, (2) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 2.243 sekolah, (3) fungsi koordinasi yang berjalan baik antara LPMP Sulawesi Selatan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Berikut tabel perbandingan tingkat capaian realisasi tahun 2015, 2016, dan 2017.



Grafik 3.34 Jumlah SD yang disupervis dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2015, 2016, dan 2017

Ketercapaian indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan fasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013 utamanya yang berkaitan dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan Pendidikan c

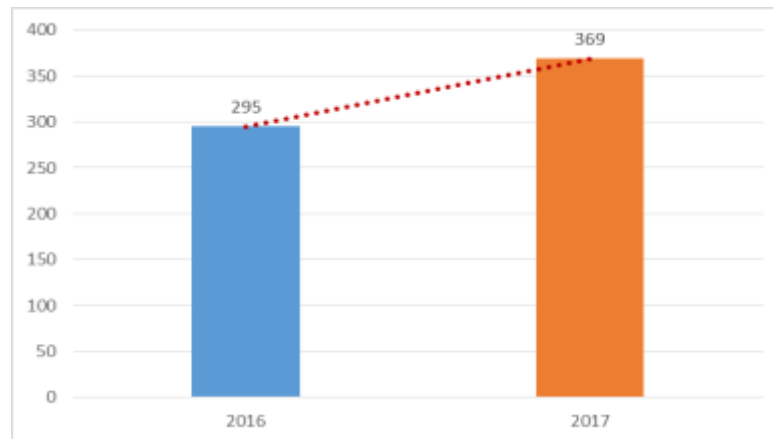
a. Pengembangan Sekolah Model

Pengembangan Sekolah Model di dukung oleh dua subprogram yaitu Sekolah Model yang Difasilitasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sekolah Model yang difasilitasi melalui kemitraan.

Pengembangan Sekolah Model berbasis SNP melalui SPMI didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah, Bimbingan Teknis SPMI, Pendampingan LPMP Ke Lokasi Bimtek, Pendampingan dan Pemberian Bantuan Sekolah Model, dan Monitoring dan Evaluasi SPMI. Sedangkan Pengembangan Sekolah Model melalui kemitraan ditunjang oleh kegiatan Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas, Bimbingan Teknis SPME, dan Monitoring dan Evaluasi SPME.

Pada tahun 2017 jumlah sekolah model jenjang SD yang dikembangkan mutu pendidikannya sejumlah 369 dari target 343 sekolah yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan karena adanya pengalihan kuota sekolah model dari jenjang SMP dan SMA sebanyak 26 sekolah.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah Sekolah model jenjang SD pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 20.05%.



Grafik 3.35 Jumlah sekolah model tahun 2016 dan 2017

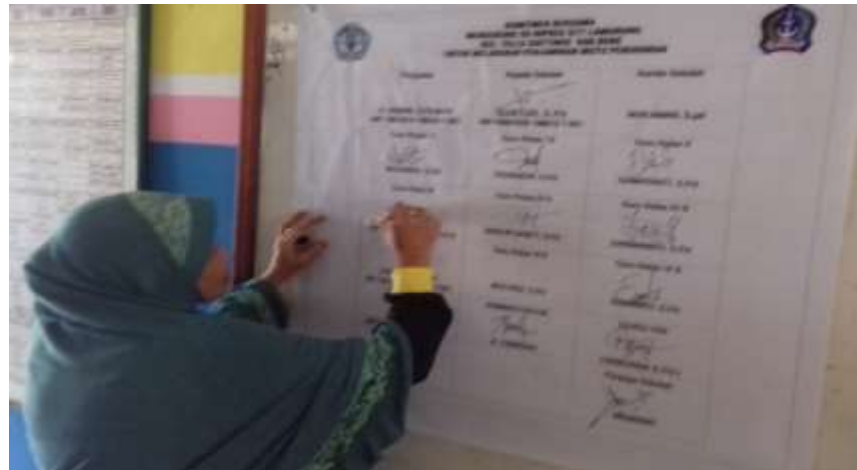
Pelaksanaan Program Sekolah Model di tahun 2017 sudah memasuki tahun kedua. Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2017 diketahui bahwa dari 369 sekolah model jenjang SD yang disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP-nya, sebanyak 61% sekolah meningkat indeks efektivitasnya. Persentase peningkatan indeks efektivitas sekolah model jenjang SD digambarkan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3.36 Persentase Peningkatan Indeks Efektivitas Sekolah Model Jenjang SD

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah model tahun 2017 antara lain; (1) beberapa Sekolah Model mengalami pergantian kepala sekolah yang mempengaruhi kinerja sekolah model, (2) adanya mutasi pengawas (fasilitator daerah) ke jabatan struktural, dan (3) Tim SPME belum optimal dalam melakukan supervise pada sekolah model.

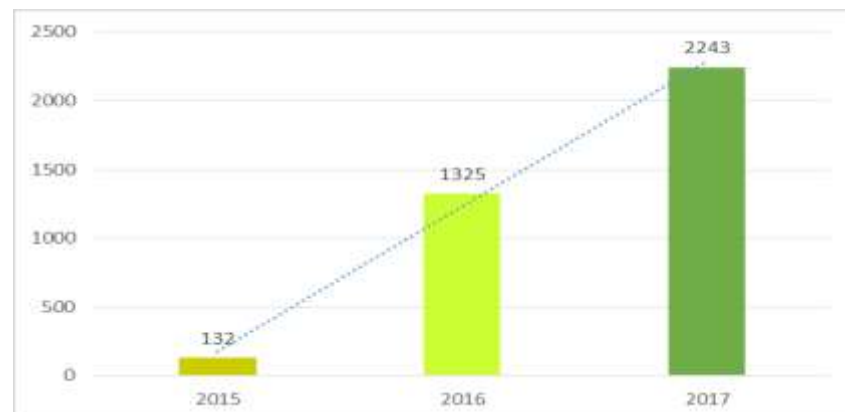
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang ditempuh adalah (1) fasilitator daerah diminta melakukan bimbingan secara intensif kepada satuan pendidikan yang mengalami pergantian kepala sekolah, (2) mengoptimalkan peran fasilitator daerah yang masih aktif, dan (3) meningkatkan peran Tim SPME melalui komunikasi yang intens antar pihak LPMP dan Dinas Pendidikan.



Dok 5. Penandatanganan Penyataan Komitmen oleh satuan pendidikan di SD Inpres 39/77 Lamurukeng Kabupaten Bone.

b. Impelemetasi Kurikulum 2013

Sekolah sasaran Kurikulum 2013 tahun 2017 jenjang SD sebanyak 2.249. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 918 sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut grafik perbandingan sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, dan 2017 jenjang SD.



Grafik 3.37 Perbandingan jumlah sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, dan 2017 jenjang SD

Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD ditunjang oleh kegiatan; Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SD, Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SD, Bimbingan Teknis Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SD, Asistensi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SD, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SD.

Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SD diuraikan sebagai berikut.

1. Rapat Koordinasi dengan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi ini merupakan tahap awal rangkaian kegiatan kurikulum 2013 dengan mengundang unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menangani pelaksanaan kurikulum 2013. Tujuannya adalah agar seluruh rangkaian kegiatan Kurikulum 2013 dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan ini sebanyak 90 orang, sedangkan yang hadir sebanyak 87 orang.

2. Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SD

Kegiatan Sosialisasi Pemberian Bantuan Pemerintah Jenjang SD dilaksanakan pada tanggal 07 s.d 09 Mei 2017, bertempat di LPMP Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah dari 224 induk klaster yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yang nantinya akan mengelola anggaran dana bantuan pemerintah pendampingan kurikulum 2013. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mensosialisasikan konsep dasar dan desain pelaksanaan Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD

tahun 2017, verifikasi data sekolah induk dan sekolah imbas dan sosialisasi pemberian dana bantuan pemerintah, penyusunan rencana penggunaan dana serta penyusunan proposal pengajuan bantuan serta Penandatanganan *MoU*.

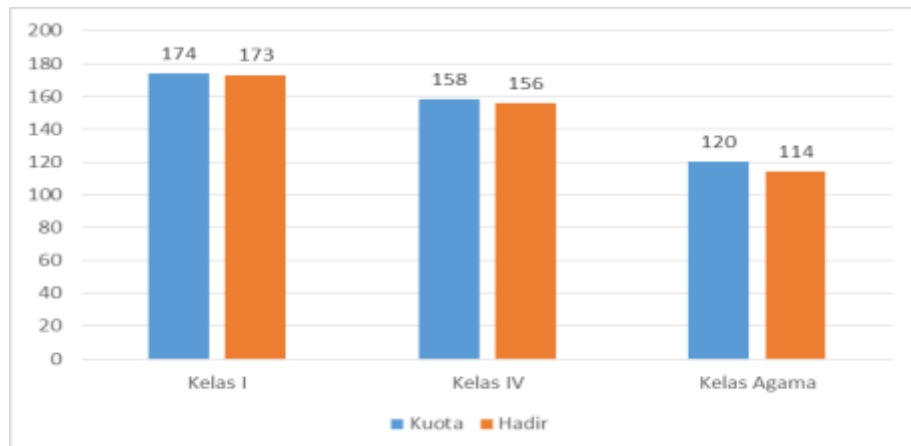
3. Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SD

Bimbingan Teknis tim pengembang kurikulum 2013 jenjang SD dilaksanakan untuk menjamin bahwa tim pengembang kurikulum 2013 memiliki pemahaman yang sama tentang konsep dan implementasi kurikulum 2013 serta strategi pelaksanaan pendampingan di sekolah dasar sehingga dapat menyampaikan materi pendampingan dengan baik kepada peserta pendampingan. Untuk jenjang SD, terdapat 4 unsur yang yang dilatihkan, yaitu Kepala Sekolah, Guru kelas I, guru kelas IV dan guru Agama. Rekapitulasi kehadiran peserta pada Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 (IK) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.19
Rekapitulasi Kehadiran Peserta Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SD

Tahun	Bimtek Tim Pengembang (IK) Jenjang SD			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	454	443	11	97,5

Tabel 3.18 diatas menunjukkan bahwa 11 orang tidak hadir dalam pelaksanaan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (IK) Jenjang SD karena beberapa alasan, antara lain sakit dan sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus dan dapat melakukan pendampingan ke sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013.



Grafik 3.38 Rekapitulasi Kehadiran Peserta Bimtek IK Per Mapel Jenjang SD



Dok 6. Peserta kegiatan Bimtek Tim Pengembangan Kurikulum 2013 jenjang SD mengikuti post tes di TPK Kampus Amkop Makassar

4. Bimbingan Teknis Guru Sasaran Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013

Sasaran kegiatan ini adalah Kepala Sekolah, Guru Kelas I, Guru Kelas IV, dan Guru Agama dari sekolah sasaran Implementasi Kurikulum 2013 yang berjumlah 2.249 sekolah. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan penyiapan Implementasi Kurikulum 2013 serta memberikan penguatan pemahaman kepada kepala sekolah dan guru untuk menjamin keterlaksanaan Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap yaitu tahap I pada tanggal 11 s.d 16 Juni 2017 yang dilaksanakan di 42 TPK dan 12 kabupaten/Kota sedangkan tahap 2 pada tanggal 04-09 Juli 2017 yang dilaksanakan di 26 TPK dan 12 kabupaten/kota.

Adapun rekap kehadiran peserta kegiatan dapat dilihat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.20
Rekapitulasi Kehadiran Peserta
Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SD

Tahun	Bimtek Tim Pengembang (IK) Jenjang SD			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	9000	8829	171	98,1

Tabel 3.20 menunjukkan bahwa 171 orang tidak hadir dalam pelaksanaan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SD karena berbagai alasan, seperti sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya, terlambatnya surat pemanggilan peserta dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke sekolah bersangkutan, masalah kesehatan, cuti, dan lain-lain. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus. Sebaran peserta bimtek guru sasaran sekolah pelaksana kurikulum 2013 jenjang SD per kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Rekapitulasi Kehadiran Peserta
Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SD
Per Kabupaten/Kota

No	Kab./Kota	Kelas I		Kelas IV		Kelas Agama	
		Kuota	Hadir	Kuota	Hadir	Kuota	Hadir
1	Kab. Maros	182	200	91	84	91	79
2	Kab. Pangkajene Kepulauan	210	145	105	135	105	130
3	Kab. Gowa	258	258	174	174	144	144
4	Kab. Takalar	126	126	123	122	83	83
5	Kab. Jeneponto	222	163	111	162	111	135
6	Kab. Barru	114	113	114	113	76	76
7	Kab. Bone	438	348	438	348	256	256
8	Kab. Wajo	279	279	281	283	180	178

No	Kab./Kota	Kelas I		Kelas IV		Kelas Agama	
		Kuota	Hadir	Kuota	Hadir	Kuota	Hadir
9	Kab. Soppeng	137	137	136	136	91	91
10	Kab. Bantaeng	97	97	97	97	51	46
11	Kab. Bulukumba	216	200	215	212	137	117
12	Kab. Sinjai	186	173	93	120	93	78
13	Kab. Kepulauan Selayar	67	67	66	66	51	51
14	Kab. Pinrang	171	168	171	160	114	114
15	Kab. Sidenreng Rappang	123	123	123	123	82	82
16	Kab. Enrekang	10	10	7	14	7	7
17	Kab. Luwu	190	133	95	120	95	120
18	Kab. Tana Toraja	109	109	109	109	77	80
19	Kab. Luwu Utara	60	60	30	30	30	30
20	Kab. Luwu Timur	84	84	84	84	56	56
21	Kab. Toraja Utara	113	113	112	112	79	79
22	Kota Makassar	278	269	277	274	185	180
23	Kota Pare-Pare	64	64	32	32	32	32
24	Kota Palopo	54	54	27	27	27	27



Dok 7. Pembukaan kegiatan Bimtek Guru sasaran oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara di TPK SDN 2 Rantepao

5. Asistensi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SD

Kegiatan Asistensi bantuan pemerintah dilaksanakan 2 tahap yaitu sebelum dan setelah pencairan dana bantuan pemerintah, tahap I pada tanggal 11 s.d 13 Juli 2017 dan tahap II pada tanggal 04 s.d 06 Desember 2017 bertempat di 224 sekolah induk klaster yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan; (a) memberikan pemahaman tentang kebijakan, substansi, dan mekanisme pendampingan kurikulum 2013, (b) menyusun dan menyepakati rencana kerja pendampingan kurikulum 2013, (c) menyusun dan menyepakati Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan pemerintah untuk pendampingan kurikulum 2013, dan (d) memahami mekanisme penyaluran, penggunaan dan pelaporan bantuan pemerintah pendampingan

6. Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Pemerintah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) penerima bantuan pemerintah pendampingan implementasi Kurikulum 2013 tahun anggaran 2017 bertujuan untuk: (a) mengendalikan mutu pelaksanaan program pemberian dana bantuan pemerintah, (b) mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan pemerintah, (c) mengidentifikasi masalah yang timbul dan upaya pemecahannya, dan (d) memberikan bantuan teknis bagi penerima bantuan pemerintah pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 jika ditemui hal-hal yang perlu segera dibenahi.

c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah: (1) Kompetensi Instruktur Kabupaten/Kota (IK) belum sesuai dengan yang diharapkan, (2) Waktu pelaksanaan kegiatan Bimtek sangat terbatas dan bersamaan dengan waktu libur sekolah dan menjelang hari raya.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: (1) Melaksanakan kegiatan bimtek sesuai waktu yang diberikan dan tetap melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas pendidikan Kab./Kota; (2) Bagi Instruktur Kabupaten/Kota yang kurang menguasai materi disandingkan dengan Instruktur lain yang dianggap lebih Kompeten. Selain itu, mereka juga diberikan *coching* khusus sebelum pelaksanaan Bimtek guru sasaran.

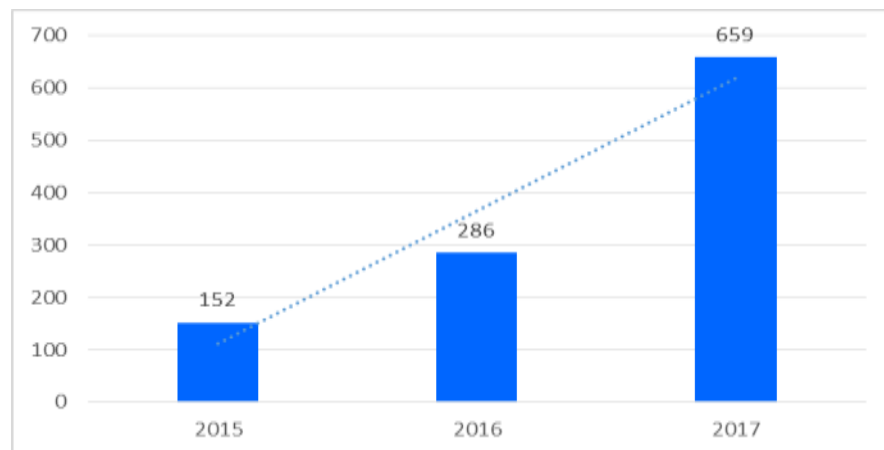
Berdasarkan permasalahan di tahun 2017, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2018 adalah:

1. Mengevaluasi *action plan* pelatihan kurikulum 2013 agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program berjalan baik.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

IKK 10. "Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 mencapai 40.28% dengan persentase capaian sebesar 100.70%. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 40%.

Meskipun realisasi indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sekolah jenjang SMP yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebanyak 286 sekolah meningkat menjadi 659 sekolah pada tahun 2017. Ini berarti ada peningkatan sejumlah 373 sekolah sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini.



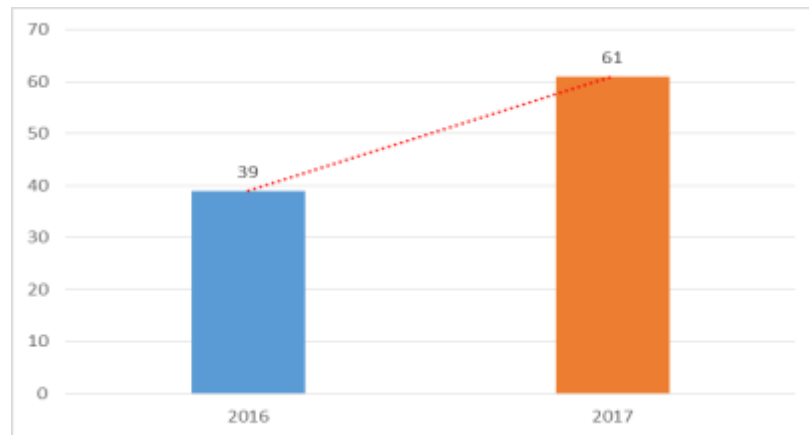
Grafik 3.39 Jumlah SMP yang disupervis dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2015, 2016, dan 2017

Ketercapaian indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan fasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013 sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Pengembangan Sekolah Model

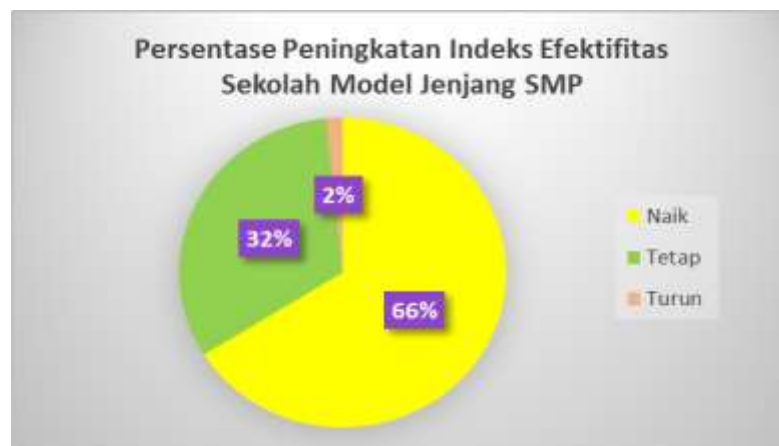
Pada tahun 2017 jumlah sekolah model jenjang SMP yang dikembangkan mutu pendidikannya sebanyak 61 sekolah dari target 63 sekolah. Berdasarkan hasil verifikasi, dari 24 calon sekolah model baru yang diusulkan dinas pendidikan kabupaten/kota, terdapat dua sekolah dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sekolah model.

Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, jumlah sekolah model jenjang SMP pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 36,07%.



Grafik 3.40 Perbandingan jumlah sekolah model jenjang SMP tahun 2016 dan 2017

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2017 diketahui bahwa dari 61 sekolah model jenjang SMP yang disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP-nya, sebanyak 66% sekolah meningkat indeks efektivitasnya. Persentase peningkatan indeks efektifitas sekolah model jenjang SMP digambarkan dalam grafik berikut ini.



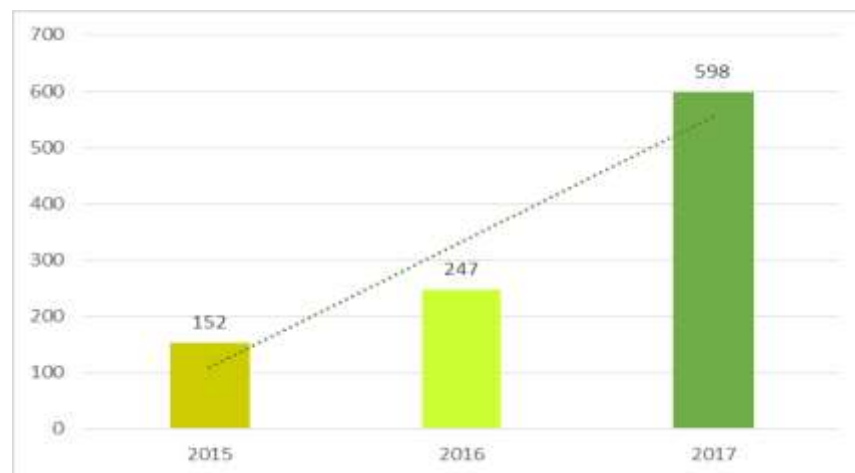
Grafik 3.41 Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas sekolah model jenjang SMP

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah model tahun 2017 antara lain; (1) beberapa Sekolah Model mengalami pergantian kepala sekolah yang mempengaruhi kinerja sekolah model, (2) adanya mutasi pengawas (fasilitator daerah) ke jabatan struktural, dan (3) Tim SPME belum optimal dalam melakukan supervise pada sekolah model.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang ditempuh adalah (1) fasilitator daerah diminta melakukan bimbingan secara intensif kepada satuan pendidikan yang mengalami pergantian kepala sekolah, (2) mengoptimalkan peran fasilitator daerah yang masih aktif, dan (3) meningkatkan peran Tim SPME melalui komunikasi yang intens antar pihak LPMP dan Dinas Pendidikan.

b. Implementasi Kurikulum 2013

Sekolah sasaran Kurikulum 2013 tahun 2017 jenjang SMP sebanyak 598. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 351 sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut grafik perbandingan sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, dan 2017 jenjang SMP.



Grafik 3.42 Perbandingan Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, dan 2017 jenjang SMP

Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP didukung oleh beberapa kegiatan berikut :

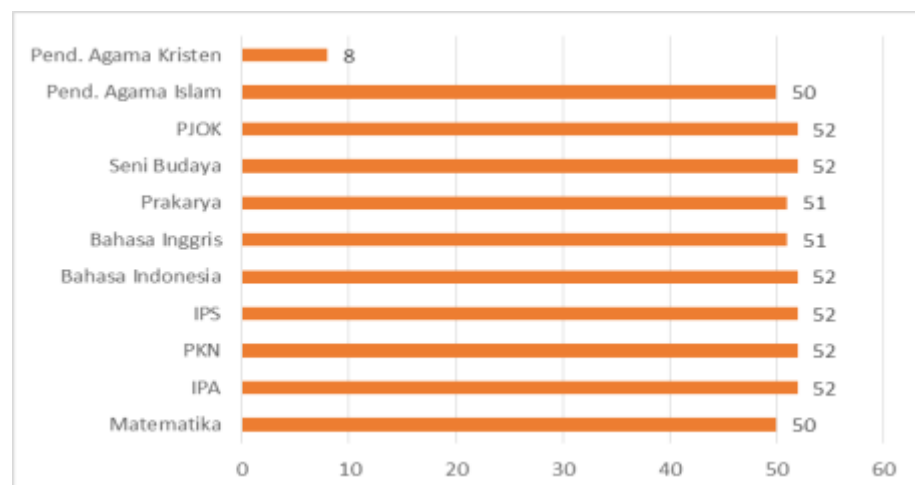
1. Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran bagi Instruktur Kabupaten/Kota yang akan melakukan pendampingan pada satuan pendidikan jenjang SMP yang menjadi sasaran Implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2017.

Pelaksanaan kegiatan bimtek Instruktur kabupaten/kota dibagi dalam dua tahap. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 14 April 2017 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 27 April 2017. Terdapat sebelas mata pelajaran yang dilatihkan pada kegiatan ini, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Pendidikan Agama, PJOK, PKn, IPA, IPS, Prakarya, dan Seni Budaya. Rekapitulasi jumlah peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMP dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.22
Rekapitulasi Kehadiran Peserta Bimtek Tim Pengembang
Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMP

Tahun	Bimtek Tim Pengembang (IK) Jenjang SMP			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	528	522	6	98,8

Tabel 3.22 diatas menunjukkan bahwa persentase kehadiran peserta Bimtek IK jenjang SMP sebesar 98,%. Sebanyak 6 orang tidak hadir dalam kegiatan tersebut karena alasan cuti dan sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus dan dapat melakukan pendampingan ke sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013.



Grafik 3.43 Jumlah IK jenjang SMP berdasarkan mata pelajaran

2. Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMP dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Mei 2017, bertempat di LPMP Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah dari 112 induk klaster yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yang nantinya akan mengelola anggaran dana bantuan pemerintah pendampingan kurikulum 2013.
3. Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013. Kegiatan ini dibagi dalam dua kegiatan utama, yaitu Bimtek Guru Sasaran Pelaksana Kurikulum 2013 dan Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013.

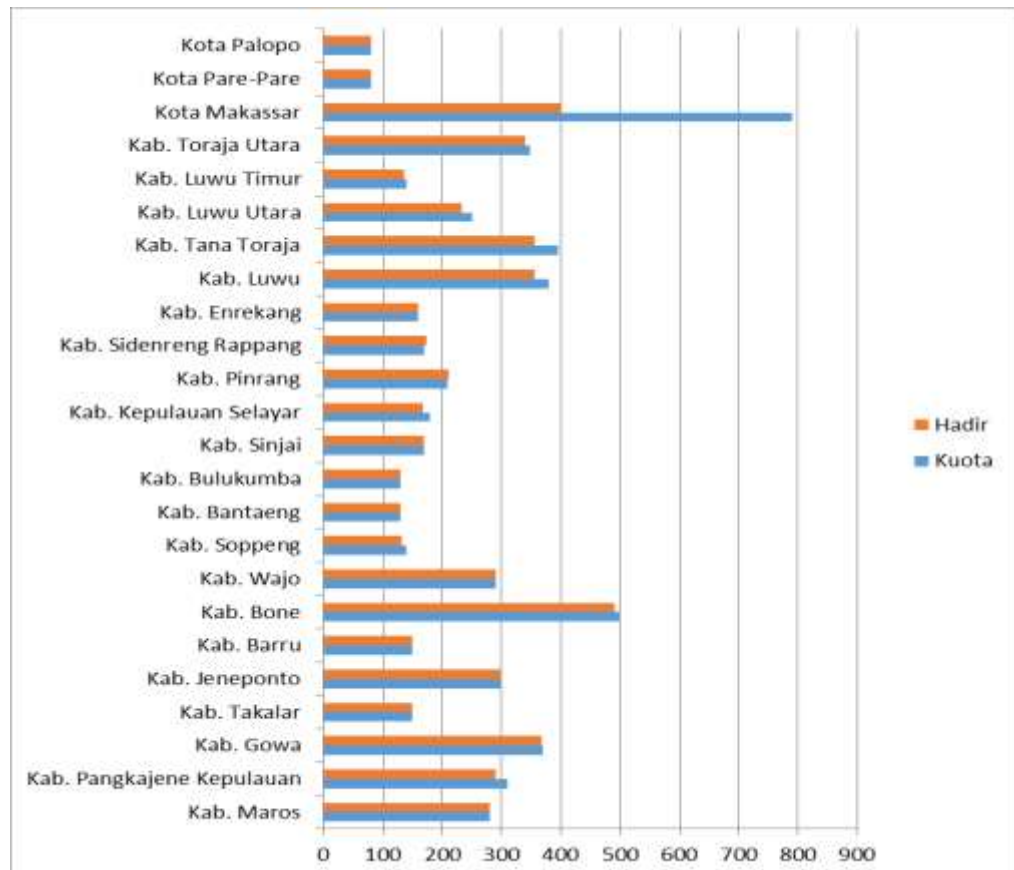
Kegiatan Bimtek Guru Sasaran dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 10 Juni 2017 dan 17 s.d. 22 Juni 2017 di 112 TPK yang tersebar pada 24 kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi seluruh guru yang mengampu pada kelas VII pada seluruh sekolah sasaran. Tujuan Bimtek Kurikulum 2013 adalah meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas mulai dari mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Rekapitulasi kehadiran peserta Bimtek IK jenjang SMP dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.23
Bimtek Tim Pengembang (IK) Jenjang SMP

Tahun	Bimtek Tim Pengembang (IK) Jenjang SMP			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	6104	5571	533	91,2

Tabel 3.23 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 533 orang tidak hadir dalam pelaksanaan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SMP. Ketidakhadiran tersebut utamanya dikarenakan

terlambatnya surat pemanggilan peserta dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke sekolah bersangkutan. Alasan ketidakhadiran lainnya adalah masalah kesehatan, cuti, tugas belajar, dan lain-lain. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus.



Grafik 3.44 Rekapitulasi Kehadiran Peserta Bimtek Guru Sasaran K 13 Per Kabupaten/Kota pada Jenjang SMP

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 24 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, tingkat ketidakhadiran peserta Bimtek Guru Sasaran terbanyak adalah dari Kota Makassar. Hal ini terjadi karena pelaksanaan Bimtek yang bertepatan dengan libur sekolah menyebabkan peserta terlambat menerima surat pemanggilan dari dinas pendidikan.



Dok 8. Peserta sedang menyimak paparan materi pada kegiatan Bimtek Guru Sasaran

Setelah kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran selesai, kegiatan implementasi Kurikulum 2013 dilanjutkan dengan Pemberian Bantuan Pelaksanaan Kurikulum 2013. Bantuan yang diberikan adalah untuk kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah. Pendampingan tersebut dalam bentuk kegiatan IN di sekolah induk klaster dan kegiatan ON di sekolah imbas.

c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

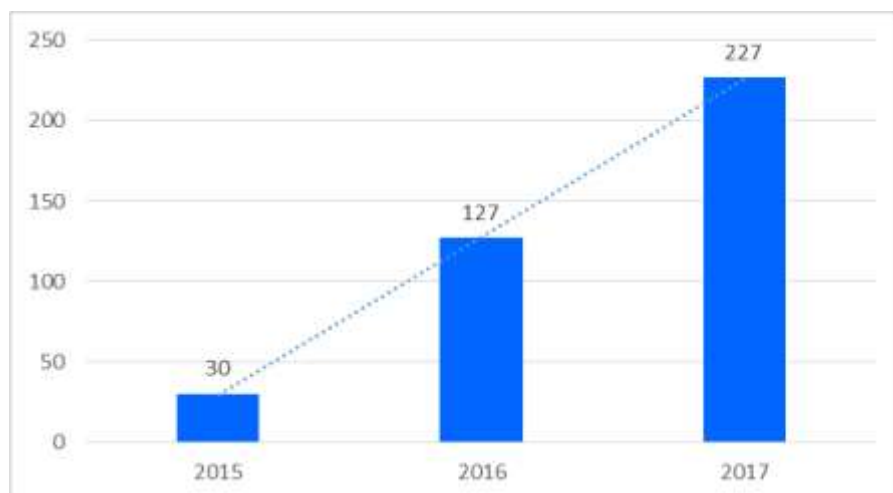
Hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan jenjang SMP adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas dan bertepatan dengan libur sekolah. Hal ini menyebabkan banyak peserta tidak dapat mengikuti kegiatan karena terlambat menerima surat pemanggilan peserta.

Agar kondisi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan program implementasi kurikulum 2013, langkah yang ditempuh adalah melakukan pengimbasan kepada peserta atau guru yang tidak hadir. Pengimbasan dilakukan oleh teman sejawat di sekolah dan atau melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota dengan LPMP Sulawesi Selatan agar permasalahan yang sama tidak terulang pada masa mendatang.

IKK 11. "Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 mencapai 40.14% dengan persentase capaian sebesar 100.34%. Capaian tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 40%. Ketidaktercapaian tersebut antara lain disebabkan koordinasi pihak LPMP Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meskipun realisasi indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sekolah jenjang SMA yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebanyak 127 sekolah meningkat menjadi 227 sekolah pada tahun 2017. Ini berarti ada peningkatan sejumlah 100 sekolah sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini.



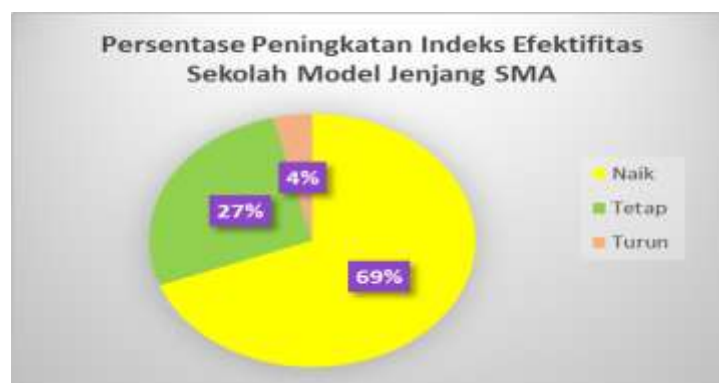
Grafik 3.45 Jumlah SMA yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2015, 2016, dan 2017

Ketercapaian indikator kinerja persentase SMA yang telah supervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dilakukan melalui Program Pengembangan Sekolah Model dan Implementasi Kurikulum 2013 utamanya yang berkaitan dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan Pendidikan.

a. Pengembangan Sekolah Model

Pada tahun 2017 jumlah sekolah model jenjang SMA yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebanyak 26 sekolah dari target 50 sekolah. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan sampai batas akhir pelaksanaan verifikasi calon sekolah model baru, pihak dinas pendidikan provinsi belum menyerahkan daftar usulan calon sekolah model jenjang SMA, sehingga kuotanya dialihkan ke jenjang SD.

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2017 diketahui bahwa dari 26 sekolah model jenjang SMA yang disupervisi dan difasilitasi pencapaian SNP-nya, sebanyak 69% sekolah meningkat indeks efektivitasnya. Persentase peningkatan indeks efektifitas sekolah model jenjang SMP digambarkan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3.46 Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Sekolah Model Jenjang SMA

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah model tahun 2017 antara lain; (1) beberapa Sekolah Model mengalami pergantian kepala sekolah yang mempengaruhi kinerja sekolah model, (2) adanya mutasi pengawas (fasilitator daerah) ke

jabatan struktural, dan (3) Tim SPME belum optimal dalam melakukan supervisi pada sekolah model.

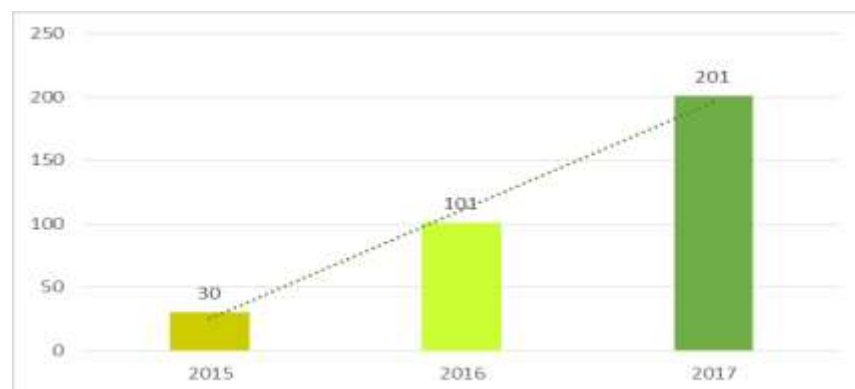
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang ditempuh adalah (1) fasilitator daerah diminta melakukan bimbingan secara intensif kepada satuan pendidikan yang mengalami pergantian kepala sekolah, (2) mengoptimalkan peran fasilitator daerah yang masih aktif, dan (3) meningkatkan peran Tim SPME melalui komunikasi yang intens antar pihak LPMP dan Dinas Pendidikan.



Dok 9. Kegiatan Pendampingan Bimtek SPMI oleh tim LPMP Sulawesi Selatan Pada tanggal 30 Juli s.d. 02 Agustus 2017

b. Implementasi Kurikulum 2013

Sekolah sasaran pelaksana kurikulum 2013 jenjang SMA tahun 2017 sebanyak 201 sekolah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut grafik perbandingan sekolah pelaksana kurikulum 2013 tahun 2015, 2016, dan 2017.



Grafik 3.47 Perbandingan Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2016 dan 2017 jenjang SMA

Ketercapaian implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA ditunjang oleh kegiatan; Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMA, Bimbingan Teknis Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA, Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA, Asistensi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMA, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMA.

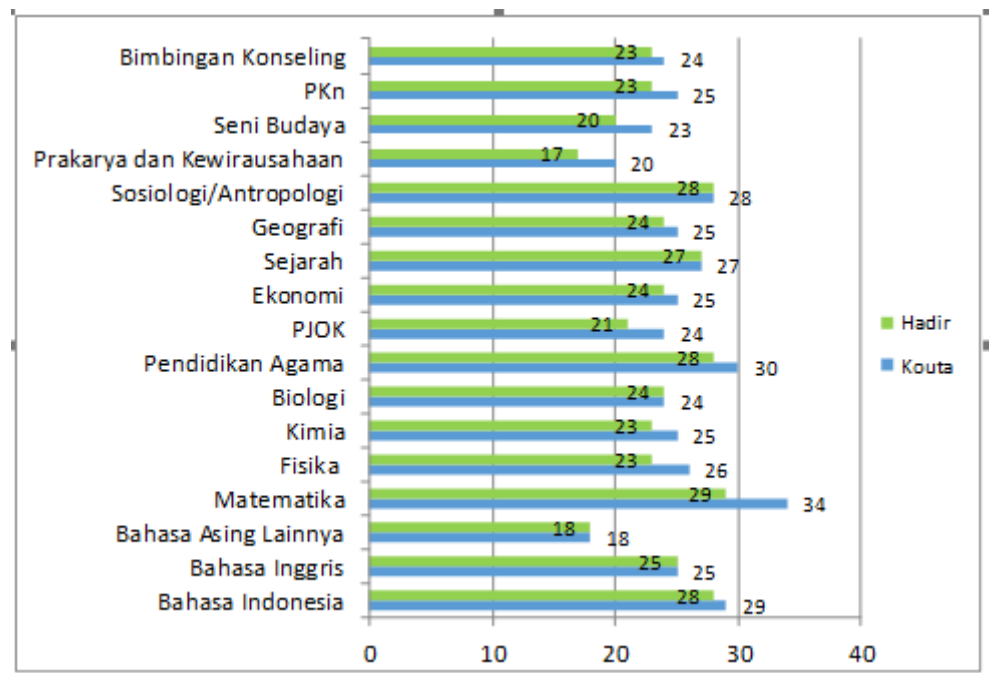
Keterlaksanaan implementasi kurikulum jenjang SMA diuraikan sebagai berikut.

1. Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis IK dalam implementasi Kurikulum 2013 dan strategi pendampingan Kurikulum 2013 pada sekolah/guru sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan di LPMP Sulawesi Selatan, Tahap I pada tanggal 29 Maret s.d. 1 April 2017 dan Tahap II tanggal 3 s.d. 6 April 2017.

Untuk jenjang SMA, terdapat tujuh belas mata pelajaran yang dilatihkan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Asing Lainnya, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Pendidikan Agama, PJOK, Ekonomi, Sejarah, Geografi, Sosiologi/Antropologi, Prakarya dan Kewirausahaan, Seni Budaya, PKn, dan Bimbingan Konseling.

Tabel 2.24
Rekapitulasi Jumlah Peserta Bimtek
Tim Pengembang Kurikulum 2013 Jenjang SMA Tahun 2017

Tahun	Bimtek Tim Pengembang Jenjang SMA			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	432	405	27	93,75



Grafik 3.48 Rekapitulasi Jumlah peserta kegiatan Bimtek IK per mata pelajaran jenjang SMA

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa sebanyak 27 peserta tidak hadir pada pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kabupaten/Kota Jenjang SMA karena berhalangan, seperti sakit dan lain-lain. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus dan dapat melakukan pendampingan ke sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013.



Dok 10. Proses belajar mengajar pada kegiatan Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat kab./kota jenjang SMA Mata Pelajaran Biologi yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 6 April 2017.

2. Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA

Mempertimbangkan sebaran lokasi dan jumlah SMA sasaran per kabupaten/kota yang bervariasi, maka pendampingan dikelompokkan dalam klaster-klaster, setiap klaster terdiri atas beberapa sekolah. Pada setiap klaster ditetapkan 1 induk klaster yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan pendampingan dalam klasternya. Pembiayaan kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di klaster menggunakan skema dana bantuan pendampingan yang diterima oleh sekolah induk klaster. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 melalui 49 SMA induk klaster pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017 (mencakup 201 SMA).

Kegiatan ini berupa sosialisasi program dana bantuan pendampingan, data/kelengkapan berkas penerima dana bantuan pemerintah, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah induk klaster penerima bantuan pemerintah dalam pengelolaan dana agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekapitulasi jumlah peserta pada kegiatan Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 23 April 2017 bertempat di LPMP Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh 49 orang kepala sekolah induk klaster.

3. Bimbingan Teknis Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA

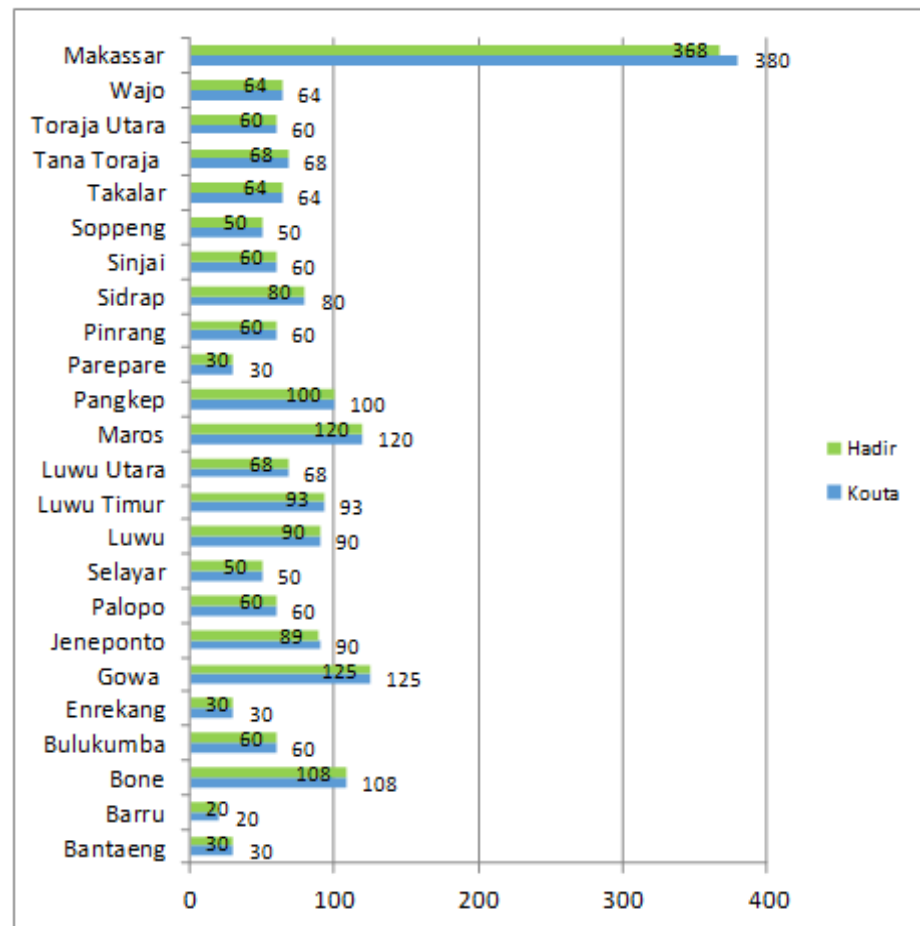
Kegiatan ini berupa pelaksanaan Diklat bagi Guru Sasaran (GS) di sekolah pelaksana Kurikulum 2013 sasaran tahun 2017. Ujung tombak dalam suksesnya implementasi Kurikulum 2013 adalah

guru, oleh karena itu guru perlu diberikan pembekalan yang cukup dalam bentuk pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis Guru Sasaran dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, mulai dari mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan baik dan benar.

Tabel 3. 25
Rekapitulasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sekolah
Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA Tahun 2017

Tahun	Bimtek GS Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	1960	1947	13	99,34

Tabel 3.25 di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi peserta pada kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA sebesar 99,34%. Sebanyak 13 peserta tidak hadir beberapa alasan. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus dan dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013.



Grafik 3.49 Rekapitulasi jumlah peserta kegiatan Bimtek GS per Kab/kota jenjang SMA

4. Asistensi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMA

Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun dan menyediakan data/kelengkapan berkas penerima dana bantuan pemerintah, menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada 49 induk kluster penerima bantuan pendampingan sesuai dengan Surat Keputusan penerima dana bantuan pendampingan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan pendampingan, dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMA

Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 merupakan suatu program yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pendampingan kurikulum, kendala dalam implementasi kurikulum, dan dampak kurikulum, sehingga dapat menjadi landasan dalam mengambil kebijakan manajerial implementasi Kurikulum 2013 pada waktu yang akan datang.



Dok 11. Pembukaan Kegiatan Bimtek Guru Sasaran Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMA di SMAN 2 Binamu Kab. Jeneponto

c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

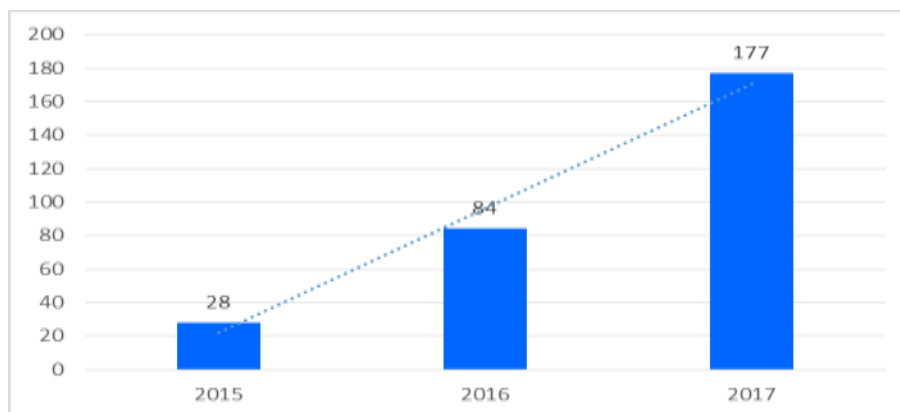
Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan pada jenjang SMA antara lain:

1. Berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana SD dan SMP dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi berakibat pada perubahan pola interaksi LPMP dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Pergantian kepala sekolah pada satuan pendidikan mempengaruhi kinerja sekolah.
3. Mutasi pengawas sekolah ke jabatan lainnya (termasuk di dalamnya Fasilitator Daerah).

IKK 12. "Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 mencapai 40.14% dengan persentase capaian sebesar 100.34%. Capaian tersebut melampaui ditetapkan sebesar 45%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah sekolah yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sekolah jenjang SMK yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebanyak 84 sekolah meningkat menjadi 177 sekolah pada tahun 2017. Ini berarti ada peningkatan sejumlah 93 sekolah sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini.



Grafik 3.50 Jumlah SMK yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP tahun 2015, 2016, dan 2017

a. Pengembangan Sekolah Model

Pada tahun 2017 jumlah sekolah model jenjang SMK yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebanyak 24 sekolah dengan capaian kinerja 100%. Jumlah tersebut sama dengan jumlah sekolah model tahun sebelumnya. Jumlah sekolah model jenjang SMK pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dalam DIPA LPMP Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2017 diketahui bahwa dari 26 sekolah model jenjang SMK yang disupervisi dan difasilitasi

pencapaian SNP-nya, sebanyak 74% sekolah meningkat indeks efektivitasnya. Persentase peningkatan indeks efektifitas sekolah model jenjang SMP digambarkan dalam grafik berikut ini.



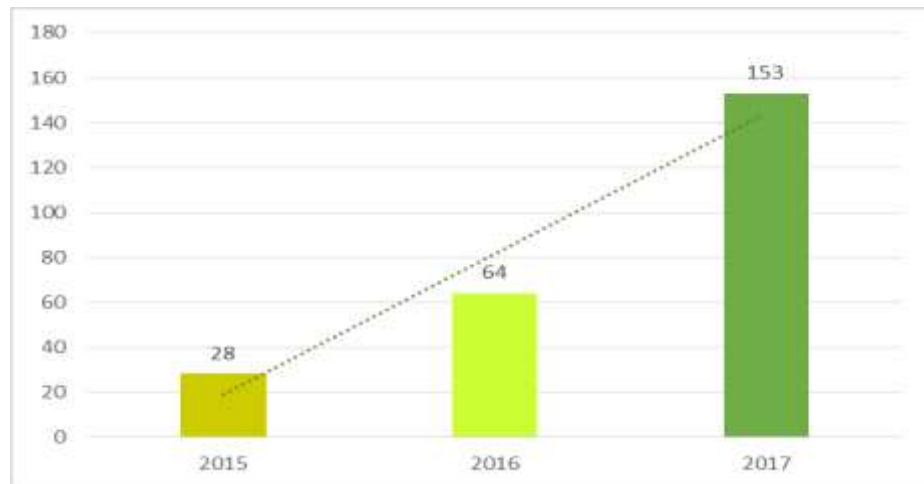
Grafik 3.51 Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Sekolah Model Jenjang SMK

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program sekolah model tahun 2017 antara lain; (1) beberapa Sekolah Model mengalami pergantian kepala sekolah yang mempengaruhi kinerja sekolah model, (2) adanya mutasi pengawas (fasilitator daerah) ke jabatan struktural, dan (3) Tim SPME belum optimal dalam melakukan supervisi pada sekolah model.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah yang ditempuh adalah (1) fasilitator daerah diminta melakukan bimbingan secara intensif kepada satuan pendidikan yang mengalami pergantian kepala sekolah, (2) mengoptimalkan peran fasilitator daerah yang masih aktif, dan (3) meningkatkan peran Tim SPME melalui komunikasi yang intens antar pihak LPMP dan Dinas Pendidikan.

b. Impelementasi Kurikulum 2013

Sekolah sasaran Kurikulum 2013 tahun 2017 jenjang SMK sebanyak 153 sekolah, dibandingkan tahun 2016 sekolah pelaksana Kurikulum 2013 mengalami kenaikan dari 64 sekolah menjadi 153 sekolah.



Grafik 3.52 Perbandingan Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2015, 2016 dan 2017 jenjang SMK

Keterlaksanaan implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK diuraikan sebagai berikut.

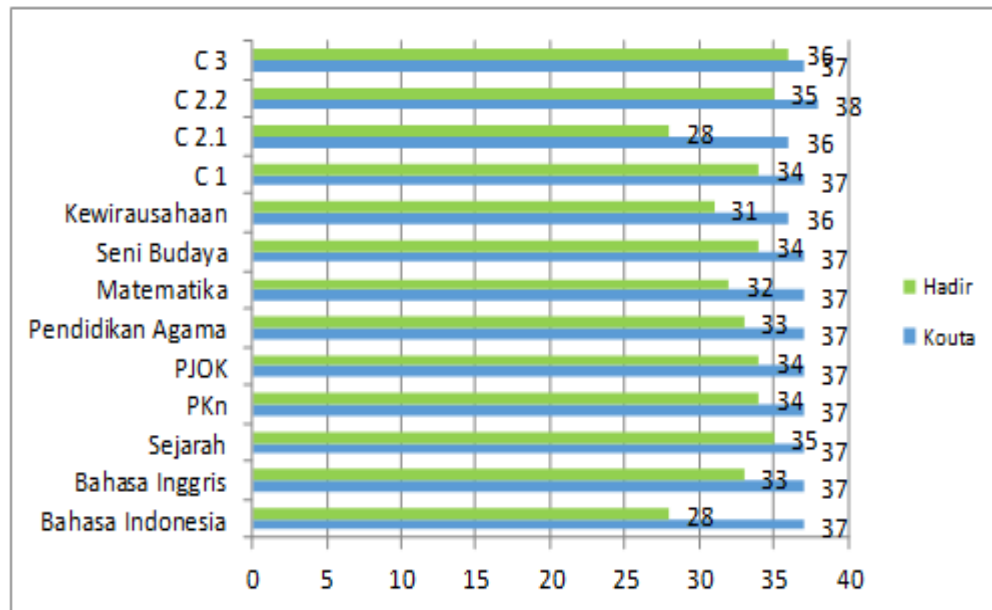
1. Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMK

Terdapat tiga belas mata pelajaran yang dilatihkan pada kegiatan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 jenjang SMK, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah, PKn, PJOK, Pendidikan Agama, Matematika, Seni Budaya, Kewirausahaan, rumpun mata pelajaran C 1, rumpun mata pelajaran C 2.1, rumpun mata pelajaran C 2.2, dan rumpun mata pelajaran C 3. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga angkatan antara tanggal 24 s.d. 12 Mei 2017 dengan durasi empat hari per angkatan.

Tabel 3.26
Rekapitulasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMK Tahun 2017

Tahun	Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Jenjang SMK			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	480	427	53	88,96

Tabel 3.26 menunjukkan bahwa 53 orang tidak hadir dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Jenjang SMK karena berhalangan, seperti sakit dan lain-lain. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus dan dapat melakukan pendampingan ke sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013.



Grafik 3.53 Rekapitulasi kehadiran peserta kegiatan Bimtek IK per mata pelajaran jenjang SMK



Dok. 12 Kegiatan belajar mengajar peserta Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota Jenjang SMK Mata Pelajaran Pendidikan Agama

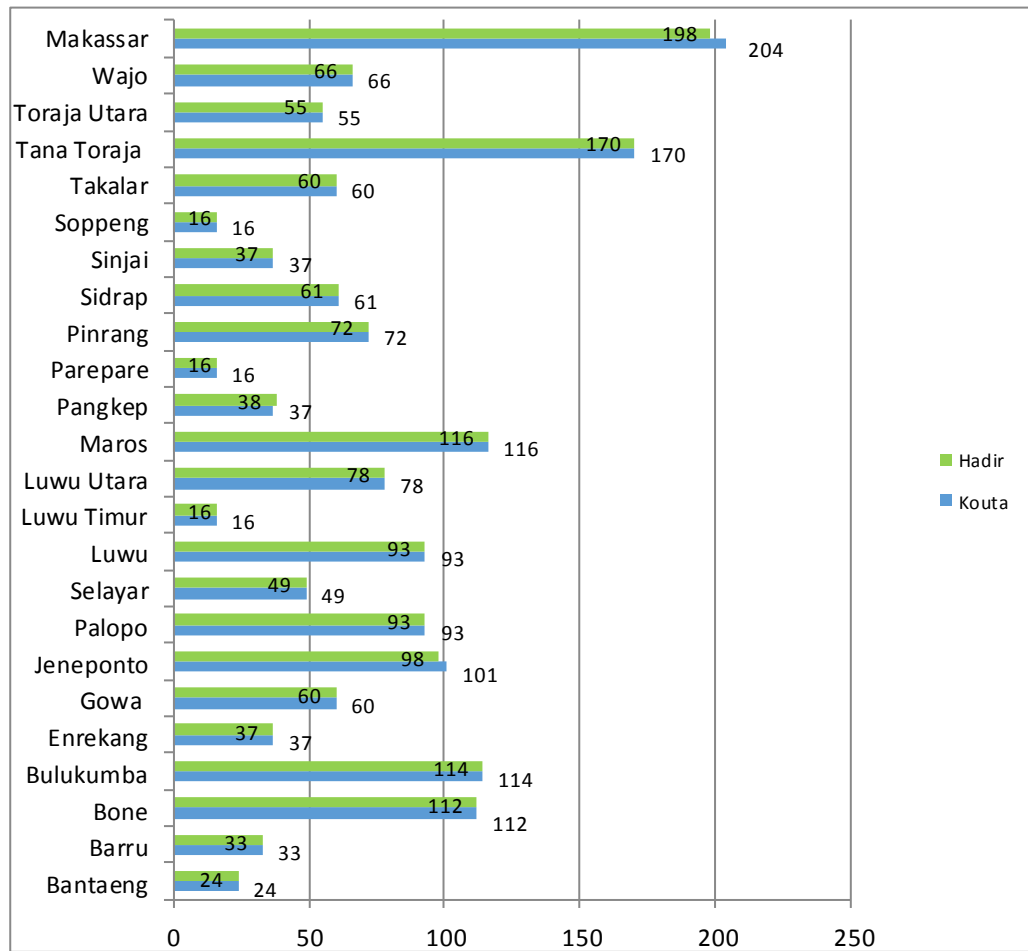
2. Bimbingan Teknis Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan bagi Guru Sasaran (GS) di sekolah pelaksana Kurikulum 2013 sasaran tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis Guru Sasaran dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, mulai dari mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Rekapitulasi jumlah peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.27
Rekapitulasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sekolah Pelaksana
Kurikulum 2013 Jenjang SMK Tahun 2017

Tahun	Bimtek GS Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	1720	1712	8	99,53

Tabel 3.27 di atas menunjukkan bahwa ada 8 orang tidak hadir dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK karena berhalangan, seperti sakit dan lain-lain. Semua peserta yang hadir dinyatakan lulus dan dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013.



Grafik 3.54 Rekapitulasi kehadiran peserta pada kegiatan Bimtek GS per kabupaten/kota jenjang SMK

3. Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK

Mempertimbangkan sebaran lokasi dan jumlah SMK sasaran per kabupaten/kota yang bervariasi, maka pendampingan dikelompokkan dalam kluster-kluster, setiap kluster terdiri atas beberapa sekolah. Pada setiap kluster ditetapkan 1 induk kluster yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan pendampingan dalam klasternya. Pembiayaan kegiatan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di kluster menggunakan skema dana bantuan pemerintah pendampingan yang diterima oleh sekolah induk kluster. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan pemerintah pendampingan

implementasi Kurikulum 2013 kepada 43 SMK induk klaster pelaksana Kurikulum 2013 (mencakup 153 SMK).

Kegiatan ini berupa sosialisasi program dana bantuan pendampingan, data/kelengkapan berkas penerima dana bantuan pemerintah, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah induk klaster penerima bantuan pemerintah dalam pengelolaan dana agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekapitulasi jumlah peserta pada kegiatan Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 dapat dilihat pada table 3.28 berikut.

Tabel 3.28
Rekapitulasi Jumlah Peserta Sosialisasi Bantuan Pemerintah
Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK
Tahun 2017

Tahun	Sosialisasi Bantuan Pemerintah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK			%
	Kuota	Hadir	Tdk Hadir	
2017	43	40	3	93,02

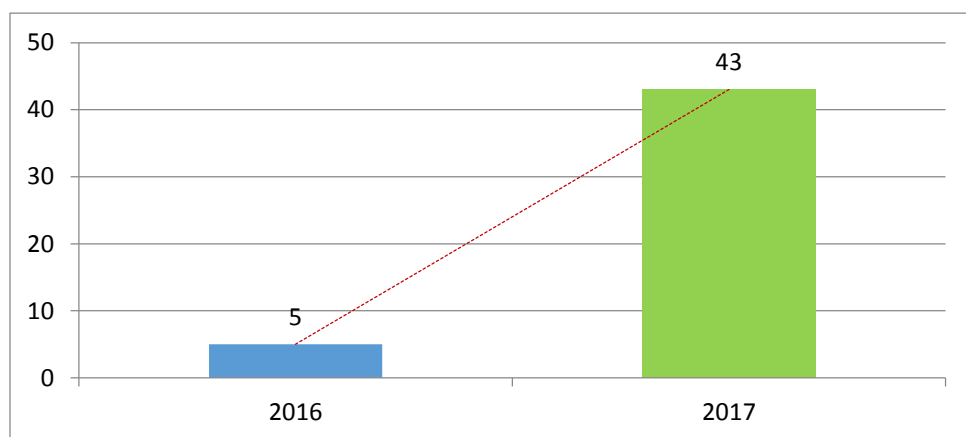
Tabel 3.28 di atas menunjukkan bahwa ada 3 orang peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Pemerintah Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK karena berhalangan, seperti sakit dan lain-lain.

4. Asistensi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMA

Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun dan menyediakan data/kelengkapan berkas penerima dana bantuan pemerintah, menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada induk klaster penerima bantuan pendampingan sesuai dengan Surat Keputusan penerima dana bantuan pendampingan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan pendampingan, dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah

pendampingan implementasi Kurikulum 2013. Jumlah induk klaster yang dikunjungi pada kegiatan Asistensi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMK adalah sebanyak 43 induk klaster SMK di 24 Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Induk klaster penerima bantuan pemerintah Kurikulum 2013 tahun 2017 Jenjang SMK sebanyak 43 induk klaster, dibandingkan tahun 2016 induk klaster penerima bantuan pemerintah Kurikulum 2013 mengalami kenaikan dari 5 induk klaster menjadi 43 induk klaster.



Grafik 3.55 Perbandingan Jumlah Induk Klaster Penerima Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Tahun 2016 dan 2017 Jenjang SMK

5. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMK

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi Kurikulum 2013 merupakan suatu program yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pendampingan kurikulum, kendala dalam implementasi kurikulum, dan dampak kurikulum, sehingga dapat menjadi landasan dalam mengambil kebijakan manajerial implementasi Kurikulum 2013 pada waktu yang akan datang. Jumlah sekolah pelaksana Kurikulum 2013 sasaran tahun 2017 yang dikunjungi pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Kurikulum 2013 Jenjang SMK adalah 153 sekolah di 24 Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.



Dok 14. Koreksi dan penyempurnaan dokumen laporan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada kegiatan Asistensi Bantuan Pendampingan Kurikulum 2013 di SMK Teknologi An-Nas Mandai Kab. Maros

c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2017 jenjang SMA dan SMK antara lain: (1) Interval waktu yang ada (mulai Agustus 2017 s.d. Desember 2017) untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan secara sistematis, tepat sasaran/tepat waktu/efektif oleh penerima bantuan pemerintah pendampingan implementasi Kurikulum 2017 belum cukup; (2) Ada instruktur yang berasal dari mata pelajaran yang berbeda dengan mata pelajaran yang dilatih; (3) Berkas pencairan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana beberapa induk klaster penerima bantuan pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2017 terlambat diajukan.

Langkah antisipasi yang ditempuh untuk menangani kendala yang tersebut adalah : (1) Mengelompokkan peserta menjadi kelompok mata pelajaran serumpun; (2) Penyelenggaraan kegiatan oleh penerima bantuan pemerintah diselenggarakan secara marathon demi efektifitas waktu yang ada; 3) Koordinasi dengan induk klaster

penerima bantuan pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2017 untuk segera mengajukan berkas pencairan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya.

Selain 12 indikator kinerja yang dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Sulawesi Selatan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berupa layanan dukungan manajemen dan layanan tata kelola perkantoran. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran dalam DIPA LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017 sebesar Rp. 98.044.617.000. Pagu tersebut digunakan untuk membiaya kegiatan peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang terdistribusi dalam 12 indikator kinerja kegiatan.

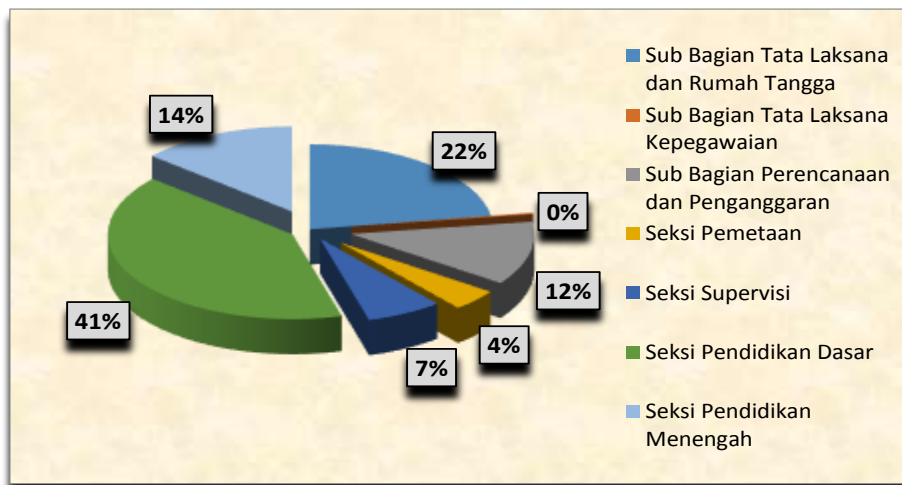
Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami *self blocking*, sehingga total pagu yang digunakan LPMP Sulawesi Selatan menjadi Rp. 90.321.399.000.

Untuk mencapai efektifitas indikator kinerja kegiatan tersebut, manajemen mengalokasikan anggaran kepada subag/seksi, sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Laksana dan Rumah Tangga Bagian Umum Rp. 20.235.142.000;
2. Sub Bagian Tata Laksana Kepegawaian Bagian Umum Rp.253.000.000;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran Bagian Umum Rp.10.971.264.000;

4. Seksi Pemetaan Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan Rp.3.749.896.000;
5. Seksi Supervisi Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan Rp.6.067.286.000;
6. Seksi Pendidikan Dasar Bidang Fasilitas Penjaminan Mutu Pendidikan Rp.36.684.501.000; dan Seksi Pendidikan Menengah Bidang Fasilitas Penjaminan Mutu Pendidikan Rp.12.360.310.000.
7. Seksi Pendidikan Menengah Bidang Fasilitas Penjaminan Mutu Pendidikan Rp.12.360.310.000.

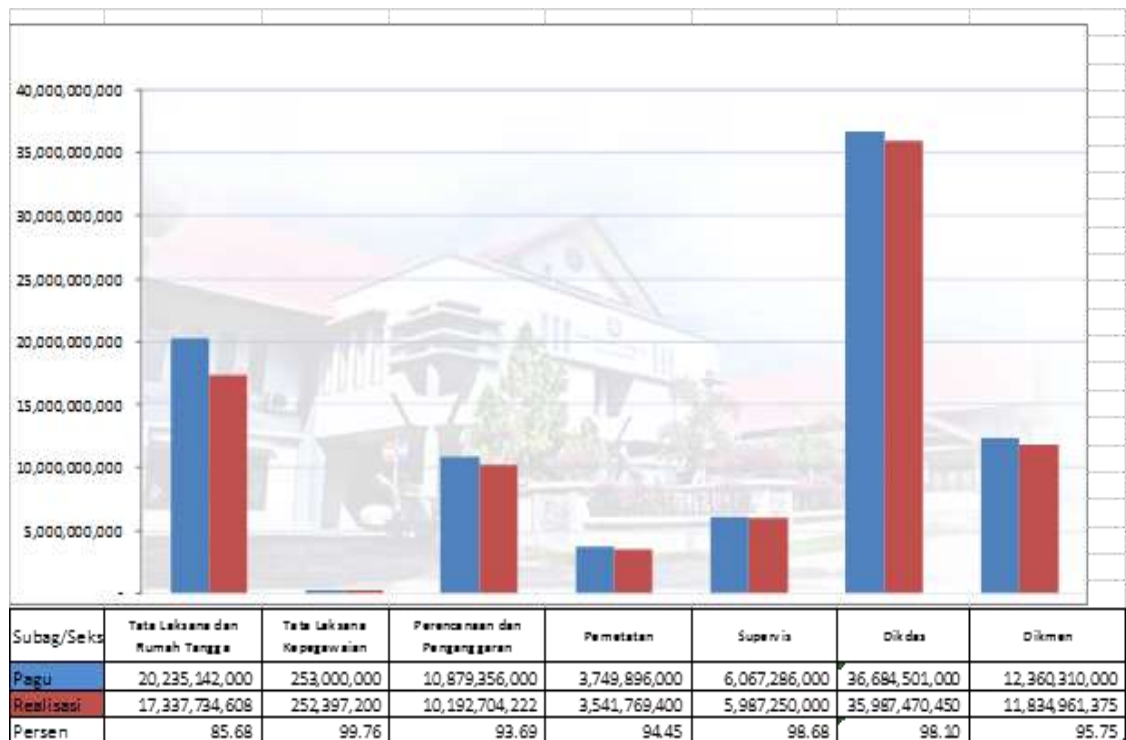
Berikut grafik pengalokasian anggaran tahun 2017 pada subag/seksi LPMP Sulawesi Selatan:



Grafik 3.56 Alokasia anggaran tahun 2017 pada subag/seksi

Dari pagu anggaran Rp 90.321.399.000 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp.85.2224.854.255 sehingga persentase daya serap anggaran LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017 adalah sebesar 94,36% setelah *self blocking* atau 86.92% dari pagu awal.

Berikut grafik daya serap anggaran tahun 2017 per pagu dan realisasi per subag/seksi:



Grafik. 3.57 Realisasi anggaran per subag/seksi

Berdasarkan persentase realisasi pagu yang dialokasi ke subag/seksi, realisasi terendah berada pada subag Tata Laksana dan Rumah Tangga yang daya serapnya hanya mencapai 85,68%. Hal ini disebabkan sebagian besar merupakan belanja modal yang kegiatannya harus dilelang. Anggaran yang tidak terserap merupakan sisa dari pengadaan lelang belanja modal yang tidak bisa dialihkan atau direvisi ke kegiatan lain (belanja barang).

Untuk perbandingan kinerja anggaran dengan capaian kinerja LPMP Sulawesi Selatan dapat digambarkan berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.29
Capaian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2017
berdasarkan output/kegiatan

Indikator Kinerja	Volume		Anggaran (Rupiah)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	9069	8655	3.749.896.000	3.541.769.400
Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	480	480	6.067.286.000	5.987.250.000
Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	3201	3196	49.044.811.000	47.822.431.825
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	4	4	1.618.572.000	1.555.631.600
Layanan Internal (Overhead)	12	12	12.886.000.000	10.474.784.813
Layanan Perkantoran	12	12	16.954.834.000	15.842.986.167

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017 sebanyak Rp. 58.861.993.000 untuk membiayai dua belas indikator kinerja sasaran strategis dan yang terserap sebesar Rp 57.351.451.225 atau 97.43%. Capaian realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.30
Capaian Realisasi Anggaran
Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya		9069 sekolah	3.749.896.000	3.541.769.400
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya.	100%		
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	40% 6408 sekolah		
	3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya.	100%		



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) 1636 sekolah	60%	
	5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya.	100%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) 580 sekolah	60%	
	7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya.	80%	
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya. Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK) 445	45%	
	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		3681 sekolah	55.112.097.000
	9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) 343 sekolah - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) 2249 sekolah	40%	21.593.310.000
	10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) 63 sekolah - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) 598 sekolah	40%	15.091.191.000
	11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%	14.763.515.750
				53.822.956.846
				21.223.954.700

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi
	Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	50 sekolah 201 sekolah	6.588.255.000	6.337.520.075
	12 Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	40% 24 sekolah 153 sekolah	5.772.055.000	5.497.441.300

Dari tabel 3.30 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Dari total anggaran sebesar Rp. 3.749.896.000 yang dialokasikan untuk indikator kinerja satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya yang terealisasi sebesar Rp. 3.541.769.400 atau sebesar 94.45%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai ketercapaian delapan indikator kinerja kegiatan.
2. Indikator kinerja satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sebesar Rp. 53.809.681.825 dari total anggaran Rp. 55.112.097.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai ketercapaian empat indikator kinerja kegiatan. Dalam DIPA, Anggaran tersebut terdistribusi pada dua output/kegiatan, yaitu:
 - a. Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP dengan total anggaran sebesar Rp. 6.067.286.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.987.250.000.
 - b. Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD, SMP, SMA, dan SMK) dengan total anggaran sebesar Rp. 49.044.811.000 dengan realisasi sebesar Rp. 47.822.431.825.

Berikut ini disajikan tabel capaian realisasi anggaran pada dua besaran indikator kinerja sasaran strategis tahun 2017.

Tabel 3.31
Capaian Realisasi Anggaran
berdasarkan Indikator Kinerja/Sasaran strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	9069 sekolah	3.749.896.000	3.541.769.400	94.45%
	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	3681 sekolah	55.112.097.000	53.809.681.825	97.64%

Efisiensi Anggaran

LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2017 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 282.183.000 yang digunakan untuk kegiatan Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang. Sumber penghematan berasal dari sisa belanja barang pada kegiatan Bimtek tim pengembang kurikulum 2013 dan pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, LPMP Sulawesi Selatan juga telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7,723,218,000. Sumber penghematan berasal dari penghematan belanja barang pada lima output kegiatan dalam DIPA LPMP Sulawesi Selatan.

Jika mengacu pada PMK No. 249 Tahun 2011, perhitungan efisiensi berdasarkan kinerja anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, LPMP Sulawesi Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 7,6%. Efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan belanja barang dan sisa kontrak belanja modal.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Sulawesi Selatan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017.

Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun tiga atas pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015 – 2019 yang memberikan informasi tingkat pencapaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Propinsi Sulawesi Selatan dengan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah.

Capaian kinerja LPMP Sulawesi Selatan difokuskan pada rencana pencapaian sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Capaian sasaran strategis tersebut didukung oleh dua belas indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut, LPMP Sulawesi Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 98.044.617.000 dan mengalami *selfblocking* sebesar Rp. 7,723,218,000, sehingga pagu LPMP Sulawesi Selatan menjadi Rp. 90.321.399.000. Dari pagu anggaran Rp. 90.321.399.000 telah berhasil terserap sebesar Rp. 85.224.854.255 sehingga daya serap LPMP Sulawesi Selatan untuk tahun 2017 sebesar 94.36% setelah *self blocking* atau 86.92% dari pagu awal.

Berdasarkan data pengukuran kinerja tahun 2017, dari dua belas indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebanyak delapan

indikator telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan dan terdapat empat indikator kinerja yang belum memenuhi target.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja tersebut, dijumpai beberapa permasalahan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain :

1. Berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana SD dan SMP dikelola oleh Pemerintah kabupaten/Kota dan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi berakibat pada perubahan pola interaksi LPMP dengan Dinas Pendidikan.
2. Kebijakan mutasi kepala sekolah dan pengawas (fasilitator daerah) oleh pemerintah daerah mempengaruhi kinerja satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal. (SPMI).
3. Penyusunan profil mutu pendidikan tidak dapat terlaksana sesuai jadwal karena raport peta mutu terlambat dikeluarkan oleh satgas PMP pusat.
4. Rendahnya kesadaran satuan pendidikan akan pentingnya data mutu. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan membebankan penginputan data pada operator, akibatnya pengiriman data mutu ke server pusat mengalami keterlambatan. Selain itu, jumlah instrument yang banyak menyebabkan operator mengalami kelelahan dan kejenuhan dalam penginputan data. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas data hasil pemetaan mutu pendidikan.
5. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis guru sasaran pelaksana kurikulum 2013 bertepatan dengan libur akhir semester, akibatnya banyak peserta tidak hadir karena terlambat menerima surat pemanggilan peserta.
6. Kebijakan pemerintah daerah masih sangat terbatas dalam mendukung keterlaksanaan penjaminan mutu pendidikan di daerah.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, maka berbagai permasalahan yang sempat muncul dan berpengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja instansi perlu diantisipasi dengan menempuh langkah-langkah taktis dan strategis seperti:

1. Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait utamanya dengan instansi yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran tim SPME (sistem penjaminan mutu eksternal) dalam mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di satuan pendidikan.
3. LPMP Sulawesi Selatan mengharapkan satgas PMP pusat dapat menampilkan raport peta mutu sesuai dengan jadwal.
4. Perlu adanya reward dan punishment bagi satuan pendidikan terkait dengan kualitas data hasil pemetaan mutu pendidikan.
5. Penyusunan dan pelaksanaan jadwal kegiatan yang melibatkan satuan pendidikan harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lain seperti jadwal ujian nasional dan semester, akreditasi, libur sekolah, dan lain-lain.
6. Perlunya sinergitas yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah serta semua stakeholder pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam bidang penjaminan mutu pendidikan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2017 merupakan landasan kuat bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi acuan agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Perjanjian Kinerja 2017 (Revisi)



Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP



TARGET CAPAIAN

PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah
KEGIATAN : Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan mutu Pendidikannya	9069 sekolah	3.249.894.000
		1. Persentase SD yang telah ditetapkan mutunya.	100%	
		2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya.	40%	
		Output: - Satuan Pendidikan yang ditetapkan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	6408 sekolah	
		3. Persentase SMP yang telah ditetapkan mutunya.	100%	
		4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya.	60%	
		Output: - Satuan Pendidikan yang ditetapkan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	1635 sekolah	
		5. Persentase SMA yang telah ditetapkan mutunya.	100%	
		6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya.	60%	
		Output: - Satuan Pendidikan yang ditetapkan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	580 sekolah	
		7. Persentase SMK yang telah ditetapkan mutunya.	80%	
		8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya.	45%	
		Output: - Satuan Pendidikan yang ditetapkan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	445	

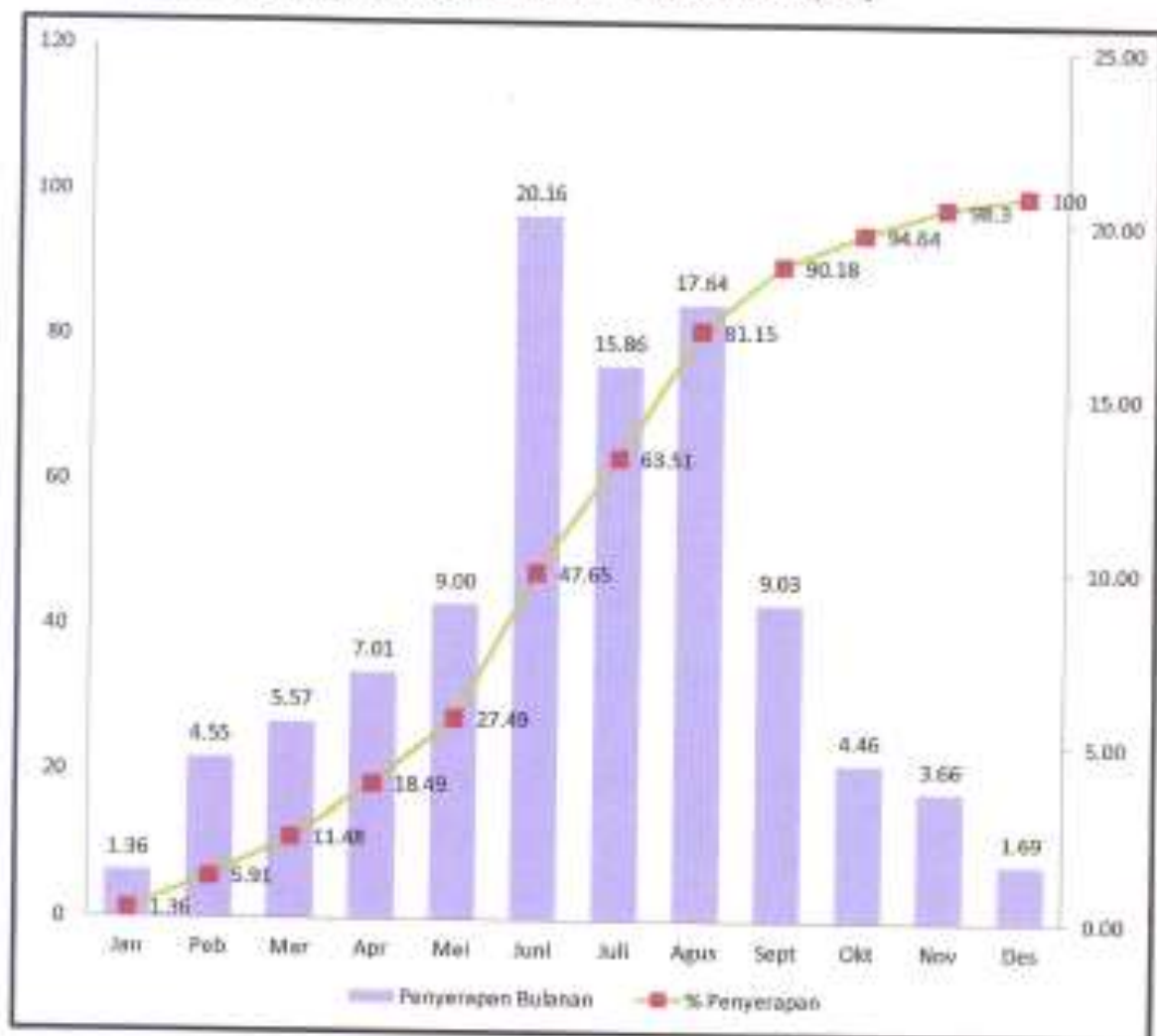


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	3681 sekolah	55.112.097.000
		1. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	40% 343 sekolah 2249 sekolah	 21.593.310.000
		2. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	40% 63 sekolah 598 sekolah	 15.091.191.000
		3. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	40% 50 sekolah 201 sekolah	 6.588.255.000
		4. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	40% 24 sekolah	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		- Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	153 sekolah	5.772.055.000

Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Layanan Pengembangan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan adalah sebesar Rp. 90.321.399.000,- (Sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



NO	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan	1.36	4.55	5.57	7.01	9.00	20.16	15.86	17.64	9.03	4.46	3.66	1.69
2	% Penyerapan	1.36	5.91	11.48	18.49	27.49	47.65	63.51	81.15	90.18	94.64	98.3	100



EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.

Jakarta, 08 September 2017

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Kepala LPMP Sulawesi Selatan,

Hamid Muhammad
NIP. 19590512 198311 1 001



Abdul Halim Muharram
NIP. 19640716 199403 1 002



3. Perjanjian Kinerja 2017 (PK awal)



Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

**TARGET CAPAIAN**

PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah
KEGIATAN : Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan
 untuk seluruh jenjang pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	9069 sekolah	4.256.256.000
		1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya.	90%	
		2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya.	20%	
		Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	6408 sekolah	
		3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya.	90%	
		4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya.	40%	
		Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	1636 sekolah	
		5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya.	90%	
		6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya.	40%	
		Output : - Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	580 sekolah	
		7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya.	80%	
		8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya.	20%	
		Output : Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	445	

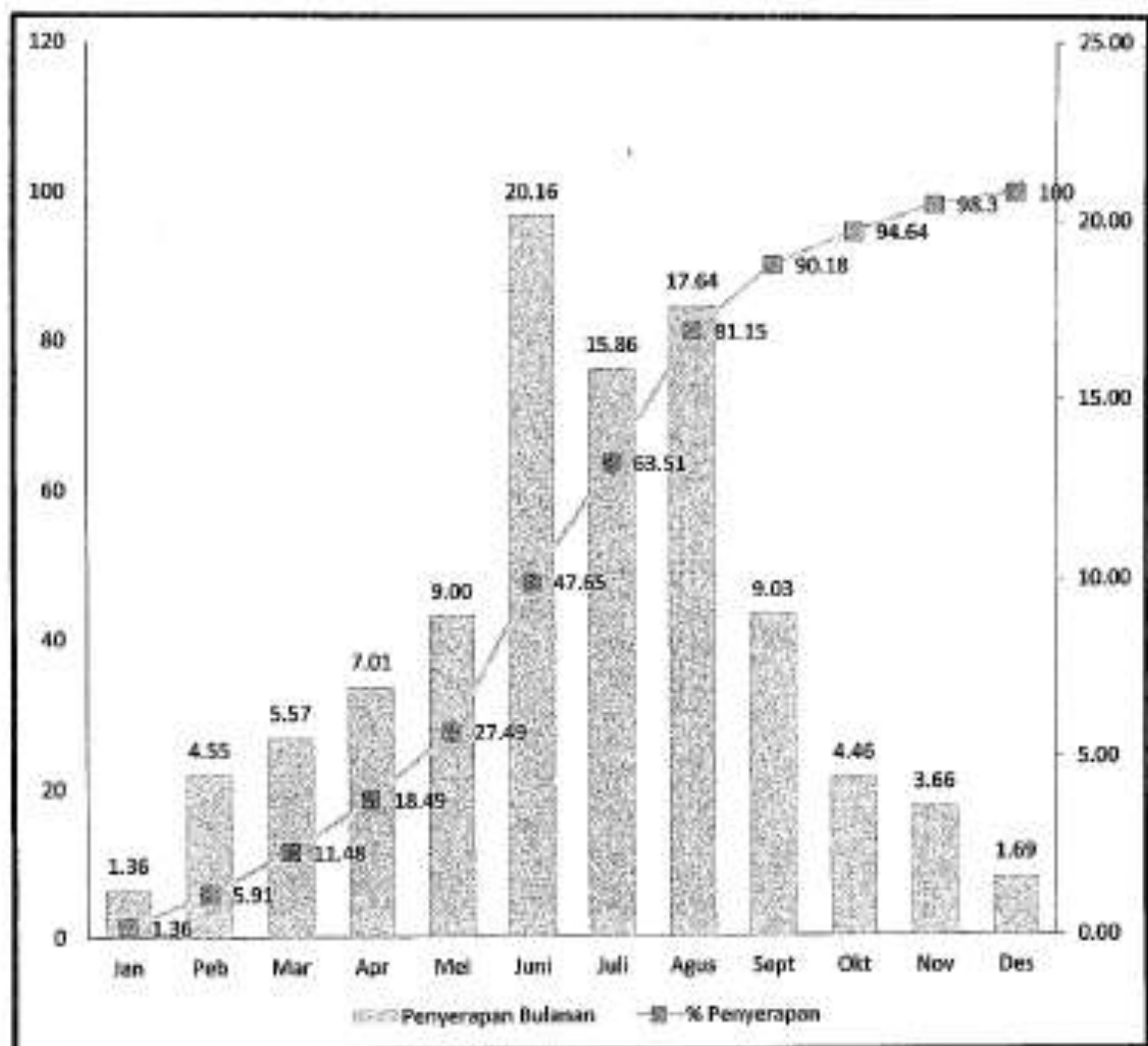


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	3481 sekolah	7.411.601.000
		1. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SD) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SD)	25% 343 sekolah 2149 sekolah	 25.899.730.000
		2. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMP)	25% 63 sekolah 198 sekolah	 13.830.490.000
		3. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA) - Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMA)	25% 50 sekolah 201 sekolah	 6.997.330.000
		4. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	25% 24 sekolah	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan (SMK)	153 sekolah	6.247.530.000

Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Layanan Pengembangan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan adalah sebesar Rp. 98.044.617.000,- (Sembilan puluh delapan miliar empat puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).



NO	Komponen	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan	1.36	4.55	5.57	7.01	9.00	20.16	15.86	17.64	9.03	4.46	3.66	1.69
2	% Penyerapan	1.36	5.91	11.48	18.49	27.49	47.65	63.51	81.15	90.18	94.64	98.3	100



EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.

Jakarta, 25 Januari 2017

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad

NIP. 19590512 198311 1 001

Kepala LPMP Sulawesi Selatan,

Abdul Halim Muharram

NIP. 19640715 199403 1 002